



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan HM Sarbini No. 37 Telp (0287) 381128 Fax. 382821

KEBUMEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026. Dokumen renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dokumen ini berisi program atau kegiatan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, berlandaskan visi dan misi Bupati Kebumen H. Arif Sugiyanto, SH dan Wakil Bupati Kebumen Hj. Ristawati Purwaningsih, SST, MM.

Dokumen perencanaan ini mempunyai nilai yang strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih atas segala bantuan informasi dan pemikiran serta kami mohon saran atau masukan atas dokumen ini.

Kebumen, September 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST., MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19740126 199903 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN	15
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
1. Jalan	38
2. Jembatan	44
3. Jaringan Irigasi	45
4. Drainase	48
5. Sistem Penyediaan Air Minum	53
6. Tata Ruang	55
7. Air Baku (Embung)	55
8. Pertanahan	56
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN	75
3.1.. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	75
3.1.1 Sekretariat	75
3.1.2 Bina Marga	75
3.1.3 Cipta Karya	76
3.1.4 Sumber Daya Air	76
3.1.5 Tata Ruang	77
3.1.6 Pertanahan	78

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	78
1. Visi	78
2. Misi	80
3. Program Unggulan	83
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	84
1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	84
2. Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Penataan Ruang / Badan Pertanahan Nasional	87
3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	88
4. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	91
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD	94
3.5. Isu-Isu Strategis	95
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	98
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	98
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	100
BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	103
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	103
6.2. Indikator Kinerja	109
6.3. Kelompok Sasaran	109
6.4. Pendanaan	109
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127
7.1. Standar Pelayanan Minimal	127
BAB VIII. PENUTUP	134
8.1. Kesimpulan	134
8.2. Kaidah Transisi	135

8.3. Kaidah Pelaksanaan 136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Per Juni Tahun 2021	28
Tabel 2.2	Pendistribusian Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2021	28
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Bulan Agustus 2021	31
Tabel 2.4	Sarana Tempat/Ruangan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2021	32
Tabel 2.5	Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	33
Tabel 2.6	Peralatan Angkutan, Komputer dan Peralatan lainnya Sampai Dengan Bulan April Tahun 2021 ..	34
Tabel 2.7	Data Aset Gedung Perkantoran DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2021	37
Tabel 2.8	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.9	Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020	40
Tabel 2.10	Panjang dan Proporsi Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020	41
Tabel 2.11	Panjang dan Proporsi Jalan Nasional di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020	42
Tabel 2.12	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43
Tabel 2.13	Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2016-2020	44
Tabel 2.14	Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	45
Tabel 2.15	Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen	46
Tabel 2.16	Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	46

Tabel 2.17	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi	47
Tabel 2.18	Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	49
Tabel 2.19	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kebumen Tahun 2020	50
Tabel 2.20	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Prembun	51
Tabel 2.21	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kutowinangun	52
Tabel 2.22	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Karanganyar	52
Tabel 2.23	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Gombong	53
Tabel 2.24	Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	54
Tabel 2.25	Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020	55
Tabel 2.26	Daftar Waduk, Longstorage dan Embung di Kabupaten Kebumen Tahun 2020	56
Tabel 2.27	Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	57
Tabel 2.28	Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.29	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.30	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2021	66
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	99
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	101

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen	127
Tabel 7.2	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	131
Tabel 7.3	Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum	132
Tabel 7.4	Rumus Indikator Kinerja dan SPM DPUPR	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	18
Gambar 2.2	Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020	39
Gambar 2.3	Capaian Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020	47
Gambar 2.4	Jumlah Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis organisasi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan dan bagaimana pemberdayaan sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan, selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep organisasi menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat megarahkan sumber daya organisasi secara efektif. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan Strategis memberikan kerangka dasar, dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mensyaratkan suatu proses penyusunan perencanaan yang dilakukan secara komprehensif, yaitu memperhatikan aspek geografis, demografis dan ekonomi termasuk berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat, sebab merencanakan sarana dan prasarana insftastruktur secara komprehensif bukan hanya merencanakan pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur, namun perencanaan yang komprehensif juga memperhatikan Faktor eksternalitas yang ditimbulkan serta penataan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan juga mempertimbangkan aspek potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki, untuk menentukan program yang tepat dan linkage dengan kebutuhan daerah yang akan dikembangkan, maupun tantangan yang harus diatasi dan diantisipasi.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan yakni 2021-2026. Dalam penyusunannya rasionalitas penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, didasarkan pada kebutuhan daerah untuk memenuhi tuntutan setiap perubahan yang selalu dinamis, dengan pemberdayaan kemampuan kapasitas internal sumber daya yang ada untuk melaksanakan dan mendukung tugas dan fungsi OPD dan sekaligus adanya cita-cita agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mampu menjadi fasilitator dari perubahan tersebut melalui upaya-upaya pengembangan infrastruktur untuk mempersiapkan diri dalam rangka persaingan global antardaerah ataupun antarnegara maupun dinamika perubahan yang terjadi dan kecenderungan perubahan di masa depan pada tataran makro ekonomi dan mikro ekonomi dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis OPD, orientasi mengenai Rencana Strategis OPD, penyusunan agenda kerja Tim Rencana Strategis OPD serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Rencana Strategis OPD dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Orientasi mengenai Rencana Strategis digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen lainya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis OPD.

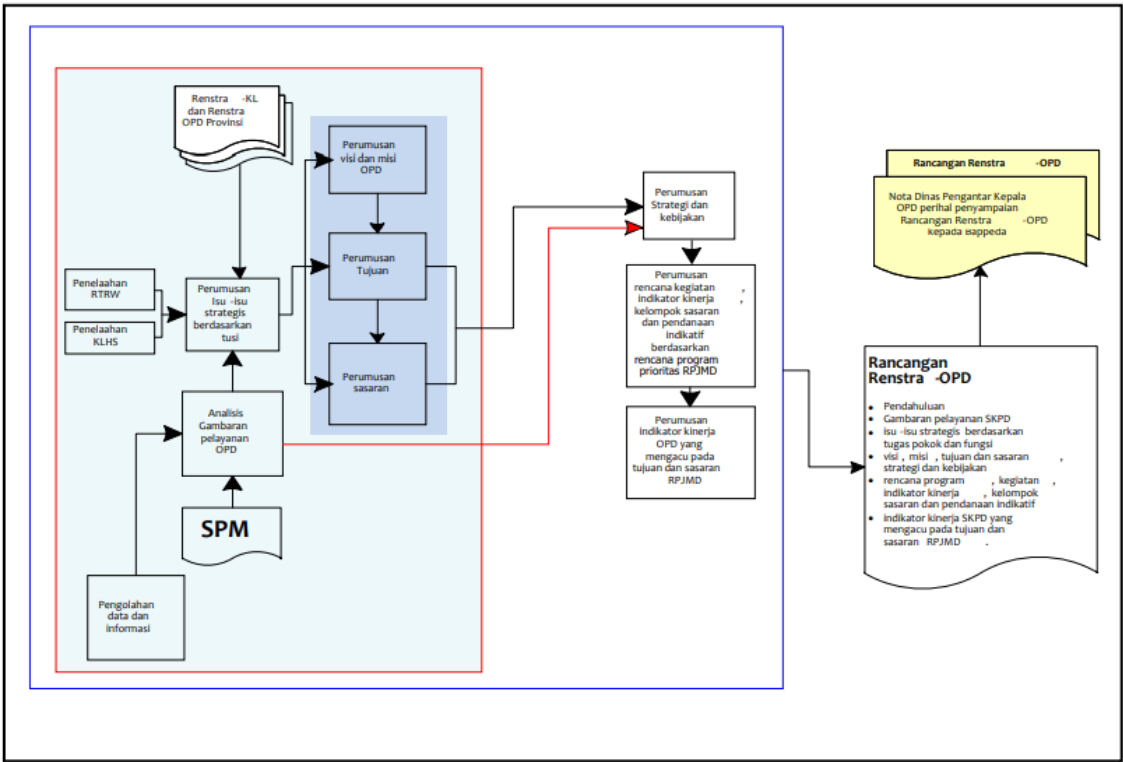
Penyusunan agenda kerja Tim Rencana Strategis OPD digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Rencana Strategis OPD dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen

rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan dan akuntabel.

Tahap penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD meliputi tahap Perumusan Rancangan Rencana Strategis OPD dan Penyajian Rancangan Rencana Strategis OPD. Perumusan isi dan substansi Rancangan Rencana Strategis OPD sangat menentukan kualitas dan dokumen Rencana Strategis OPD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis OPD adalah Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menunjukkan program dan target indikator yang harus dicapai oleh OPD selama 5 (lima) tahun, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD. Hasil yang diperoleh dari kegiatan perumusan Rancangan Rencana Strategis OPD disusun secara sistematis ke dalam naskah Rancangan Rencana Strategis OPD dengan sistematika mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

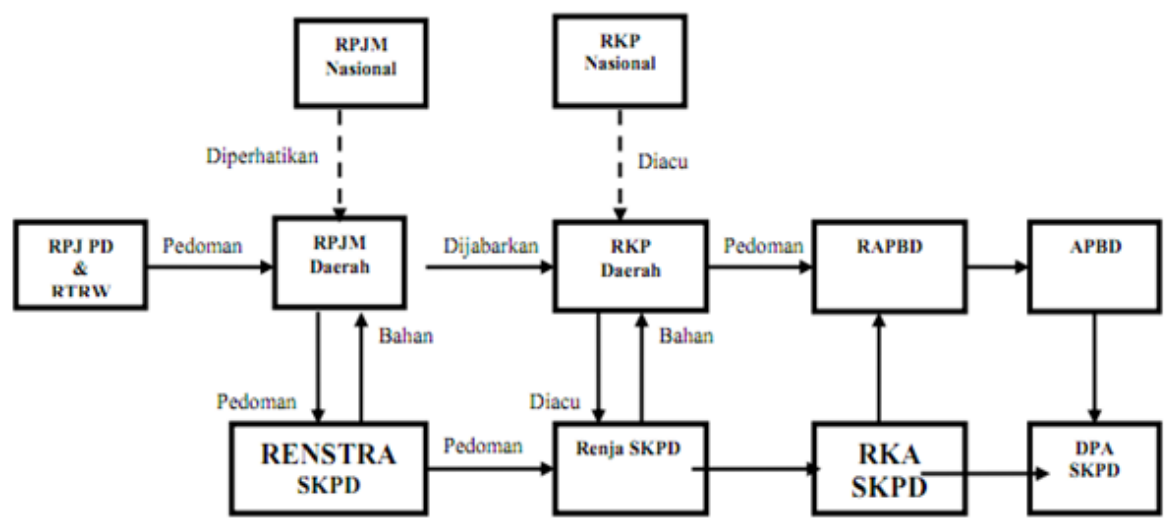
Tahapan penyusunan Rancangan Rencana Strategis OPD dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD yaitu :

**“KEBUMEN YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS
 AGROBISNIS”**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan tahapan penting dari RPJPD Tahun 2005-2025. Secara umum sasaran pokok pembangunan

yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Kebumen 2005-2025 dalam pembangunan sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dan terbentuknya karakter budaya (jati diri) masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sasaran pokok lainnya adalah berkurangnya tingkat kemiskinan penduduk yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin, meningkatnya tingkat pendapatan penduduk miskin, meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta meningkatnya harkat hidup dan martabat penduduk miskin.

Arah kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kebumen 2020-2025 dalam pencapaian visi daerah akan dicapai melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing keluaran pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan, peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan kemampuan dalam pemberantasan penyakit melalui upaya preventif dan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Daerah Kabupaten Kebumen dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031 dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kebumen dan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Renstra Kementerian PUPR, Kementerian ATR dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (L.N.R.I Tahun 2020 Nomor 245, T.L.N.R.I Nomor 6573)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan Pekerjaan Umum yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen periode Tahun 2021-2026.

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan khususnya Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan;
3. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dibuatnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi misi Bupati Kebumen yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode lima tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat

Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
2. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
6. pelaksanaan administrasi dinas bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah, terdiri atas 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas, 4 Kepala Bidang, 3 Kepala Subbagian dan 12 Kepala Seksi, dan 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :

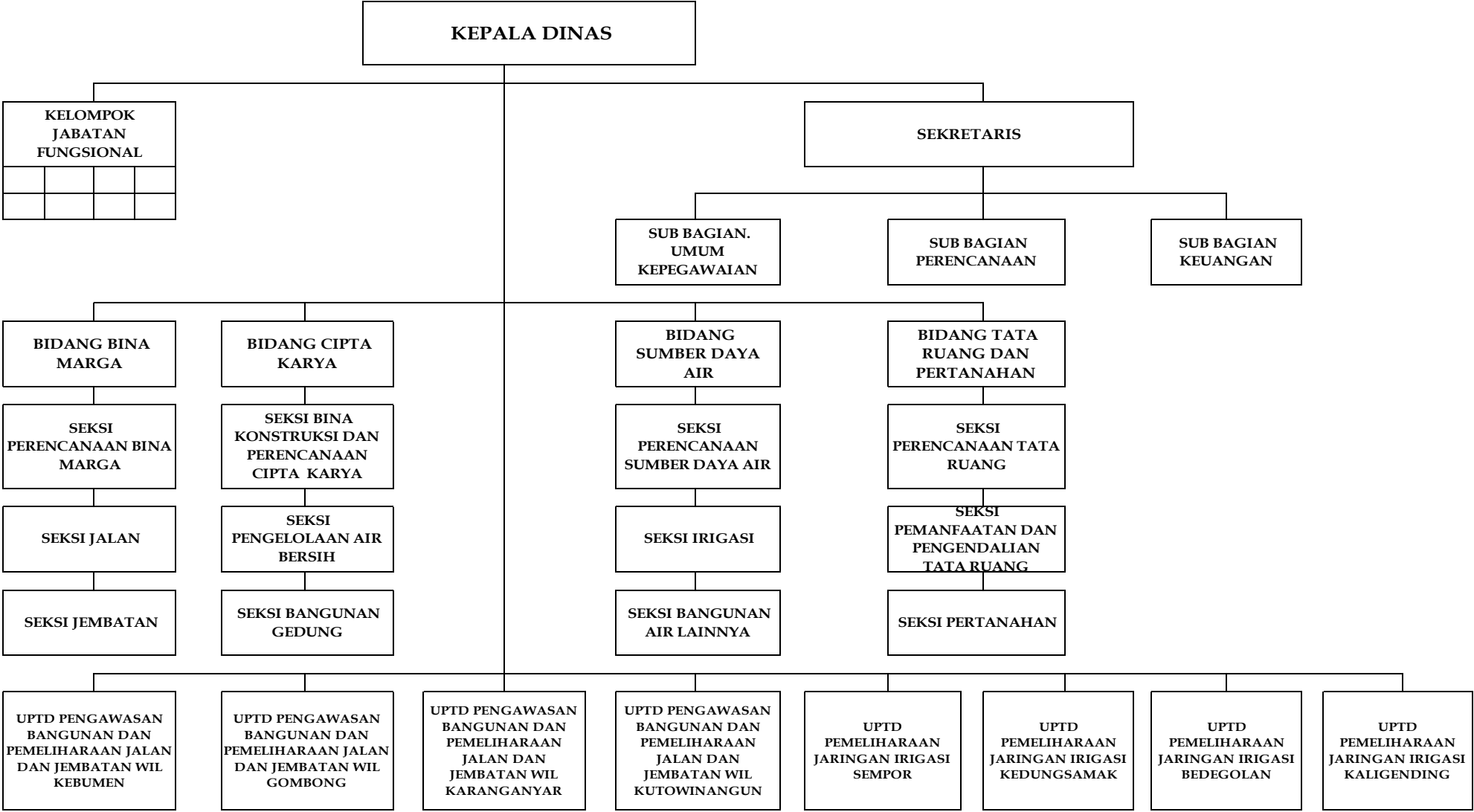
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan
 - b. Kepala Subbagian Keuangan
 - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga
 - b. Kepala Seksi Jalan
 - c. Kepala Seksi Jembatan
4. Kepala Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Bina Konstruksi Dan Perencanaan Cipta Karya
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih
 - c. Kepala Seksi Bangunan Gedung
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - b. Kepala Seksi Irigasi
 - c. Kepala Seksi Bangunan Air Lainnya
6. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan ;
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 - c. Kepala Seksi Pertanahan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 - a. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kutowinangun, berkedudukan di Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Kutowinangun, Buluspesantren, Ambal, dan Poncowarno;
 - b. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Kebumen, berkedudukan di Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Petanahan, Karangsambung, Alian, Sadang, Klirong, dan Sruweng;
 - c. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Karanganyar, berkedudukan di Karanganyar dengan

wilayah kerja meliputi Kecamatan Karanganyar, Karanggayam, Puring, Adimulyo, dan Kuwarasan;

- d. UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Gombong, berkedudukan di Gombong dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gombong, Sempor, Buayan, Rowokele, dan Ayah;
- e. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempor berkedudukan di Karanganyar dengan wilayah kerja meliputi sebagian Kecamatan Sruweng, Gombong, Karanganyar, sebagian Adimulyo, Kuwarasan, Buayan, Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, sebagian Puring;
- f. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedungsamak berkedudukan di Pejagoan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pejagoan, Klirong, Petanahan, Puring, sebagian Adimulyo, sebagian Sruweng;
- g. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kaligending, berkedudukan di Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kebumen, Poncowarno, sebagian Buluspesantren, Karangsambung, Sadang, Alian;
- h. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bedegolan, berkedudukan di Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Ambal, Padureso, Kutowinangun, Poncowarno, dan sebagian Buluspesantren.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tugas Pokok : memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
Fungsi :
 1. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 2. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 3. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 4. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 5. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 6. pelaksanaan administrasi dinas bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
 7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Nama Jabatan : Seketaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tugas Pokok : melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,

dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

- Fungsi :
1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
 2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 4. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
 6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Nama Jabatan : Kasubbag Perencanaan
 Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

4. Nama Jabatan : Kasubbag Keuangan
Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
5. Nama Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan.

Fungsi :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;
 3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

- jembatan; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga.
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan, penelitian dan pengembangan bidang bina marga, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan pengelolaan alat berat.
 8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jalan
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan, peningkatan, operasional dan pemeliharaan jalan.
 9. Nama Jabatan : Kepala Seksi Jembatan
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.
 10. Nama Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air
Tugas Pokok : melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai dan pantai serta air baku.

- Fungsi : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai dan drainase;
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
11. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya, penelitian dan pengembangan bidang sumber daya air, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya.
12. Nama Jabatan : Kepala Seksi Irigasi
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.
13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bangunan Air Lainnya
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

14. Nama Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Tugas Pokok : melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan air bersih, bangunan Gedung dan pembinaan konstruksi.
Fungsi :
 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perumahan dan tata ruang dan urusan bidang pertanahan;
 3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan prasarana dan sarana permukiman; dan
 4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
15. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bina Konstruksi dan Perencanaan Cipta Karya.
Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta

- anggaranannya, pembinaan, bimbingan, pengembangan, evaluasi program kegiatan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya, pelaksanaan administrasi Teknik dan pembinaan konstruksi.
16. Nama Jabatan : Kepala Seksi Bangunan Gedung
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih, perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.
17. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih.
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggaranannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.
18. Nama Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
 Tugas Pokok : melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.
 Fungsi : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pemanfaatan dan

- pengendalian tata ruang serta pertanahan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta bidang pertanahan;
 3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan; dan
 4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
19. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan Tata Ruang, pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan penataan ruang.
20. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, serta pelaksanaan administrasi teknik.
21. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pertanahan.
 Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

- perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan serta pelaksanaan administrasi pertanahan.
22. Nama Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Tugas Pokok : melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi perbaikan saluran, perbaikan pintu air, pembagian air, pengawasan jaringan irigasi dan pemberian bantuan teknis/rekomendasi bangunan teknis pengairan.
23. Nama Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Sarana Prasarana Keciaptakaryaan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Tugas Pokok : melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan pengawasan sarana prasarana keciaptakaryaan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Pemerintah Daerah dewasa ini dituntut untuk lebih professional dalam menjalankan tugas, terutama dalam melayani masyarakat. Secara umum manajemen kepegawaian meliputi proses usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usulan SPK tenaga kontrak/honorer sebagaimana kebijakan Pemerintah Daerah.

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi. Pengembangan potensi ini meliputi pembinaan karier seperti usulan promosi, penyertaan Aparatur Sipil Negara dalam berbagai diklat, seperti Diklat Struktural, Diklat Teknis Fungsional, dan Diklat Keahlian lainnya. Termasuk di dalamnya dukungan penuh terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanjutkan studi melalui ikatan dinas maupun proses ijin belajar.

Terkait dengan disiplin pegawai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berusaha untuk menegakkan disiplin melalui

pengawasan konsistensi Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan jam kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara melalui upaya peringatan dan pembinaan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 214 orang ASN, 10 orang PTT dan 52 orang THL, secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.1
Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Per Juni Tahun 2021

ESELON	BERDASAR GOL						BERDASAR PENDIDIKAN							JABATAN	
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	D1-D4	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL
ESLON II	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
ESLON III	3	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	4	4	-
ESELON IV	3	20	-	-	-	23	5	12	6	-	-	-	23	23	-
STAF	-	33	137	17	-	187	-	13	7	137	18	12	187	-	187
PTT	-	-	-	-	10	10	-	-	1	8	-	1	10	-	10
THL	-	-	-	-	52	52	-	15	3	31	-	3	52	-	52
JUMLAH	7	54	137	17	62	277	9	41	17	176	18	16	277	28	249
% DARI TOTAL	2,53	19,49	49,46	6,14	22,38	100,00	3,25	14,80	6,14	63,54	6,50	5,78	100,00	10,11	89,89

Sumber : Dinas DPUPR Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data kepegawaian di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan SLTA masih mendominasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan prosentase sebesar 63,54%, jenjang pendidikan SD sebesar 5,78%, jenjang pendidikan SLTP sebesar 6,50%, jenjang pendidikan Diploma sebesar 6,14%, jenjang pendidikan Strata I sebesar 14,80% dan jenjang pendidikan Strata II sebesar 3,25%. Rendahnya tingkat jenjang pendidikan SDM yang dimiliki Dinas berdampak pada tingkat kinerja Perangkat Daerah, kondisi ini mendesak harus segera ditangani dengan memberikan ruang belajar kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan jenjang pendidikan baik dengan ijin belajar maupun tugas belajar.

Tabel 2.2
Pendistribusian Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2021

NO	RINCIAN	PNS	PHL
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1	

2	Sekretariat		
	a. Sekretaris	1	
	b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	
1	2	3	4
	c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	
	d. Jabatan Fungsional Umum Sekretariat	26	
	e. Pegawai Harian Lepas		14
3	Bidang Bina Marga		
	a. Kepala Bidang	1	
	b. Kepala Seksi Jalan	1	
	c. Kepala Seksi Jembatan	1	
	d. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum Bidang Bina Marga	22	
	f. Pegawai Harian Lepas		13
4	Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang		
	a. Kepala Bidang	1	
	b. Kepala Seksi Bangunan Gedung	0	
	c. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Permukiman	1	
	d. Kepala Seksi Perumahan, Tata Ruang dan Pertanahan	1	
	e. Calon Jabatan Fungsional Tertentu	3	
	f. Jabatan Fungsional Umum Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	7	
	g. Pegawai Harian Lepas		9
5	Bidang Sumber Daya Air		
	a. Kepala Bidang	1	
	b. Kepala Seksi Irigasi	1	
	c. Kepala Seksi Sungai, Pantai dan Drainase	1	
	d. Kepala Seksi Air Baku	1	
	e. Jabatan Fungsional Umum Bidang Sumber Daya Air	9	
	f. Pegawai Harian Lepas		3
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Gombong		
	a. Kepala UPTD Wilayah Gombong	1	
	b. Kepala TU UPTD Wilayah Gombong	1	
	c. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Gombong	11	
	d. Pegawai Harian Lepas		4
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Karanganyar		
	a. Kepala UPTD Wilayah Karanganyar	1	
	b. Kepala TU UPTD Wilayah Karanganyar	1	
	c. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Karanganyar	12	

	d. Pegawai Harian Lepas		4
8	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kebumen		
	a. Kepala UPTD Wilayah Kebumen	1	
	b. Kepala TU UPTD Wilayah Kebumen	1	
1	2	3	4
	c. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Kebumen	7	
	d. Pegawai Harian Lepas		6
9	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kutowinangun		
	a. Kepala UPTD Wilayah Kutowinangun	1	
	b. Kepala TU UPTD Wilayah Kutowinangun	1	
	c. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Kutowinangun	8	
	d. Pegawai Harian Lepas		4
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Sempor		
	a. Kepala UPTD Wilayah Sempor	1	
	b. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Sempor	25	
11	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kedungsamak		
	a. Kepala UPTD Wilayah Kedungsamak	1	
	b. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Kedungsamak	21	
	c. Pegawai Harian Lepas		2
12	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kaligending		
	a. Kepala UPTD Wilayah Kaligending	1	
	b. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Kaligending	18	
	c. Pegawai Harian Lepas		2
13	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Bedegolan		
	a. Kepala UPTD Wilayah Bedegolan	1	
	b. Jabatan Fungsional Umum UPTD Wilayah Bedegolan	17	
	c. Pegawai Harian Lepas		1
	JUMLAH	212	62

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data kepegawaian di atas, terlihat bahwa masing-masing Bagian/ Bidang/ Unit memiliki jumlah pegawai yang beragam, hal ini menyesuaikan beban kerja yang terdapat pada masing-masing Bagian/ Bidang/ Unit. Meskipun demikian, untuk memperlancar pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen masih

memerlukan penambahan Sumber Daya Manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan linear dengan pekerjaan yang ada.

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Bulan Agustus 2021

NO	BAGIAN/ BIDANG	PNS		PHL	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	6	5
1	Sekretariat	23	7	10	4
2	Bina Marga	24	2	12	1
3	Cipta Karya dan Penataan	11	1	6	3
4	Sumber Daya Air	12	1	2	1
5	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Gombong	10	3	4	0
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah	10	4	3	1
7	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kebumen	5	4	6	0
8	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah	9	1	4	0
9	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Sempor	25	1	0	0
10	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kedungsamak	21	1	2	0
11	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Kaligending	18	1	2	0
12	Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah Bedegolan	18	0	1	0
	JUMLAH	186	26	52	10

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data kepegawaian di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Dari total jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebanyak 274, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 238 (87 %) dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 36 (13 %), hal ini menunjukan bahwa masih keterwakilan perempuan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen belum mencapai konsesus 30%.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersedia sarana dan prasarana:

Tabel 2.4
Sarana Tempat/Ruangan Sampai Dengan Bulan April Tahun 2021

NO	RINCIAN	JUMLAH RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
2	Ruang Sekretaris Dinas	1	Baik
3	Ruang Tamu	1	Baik
4	Resepsionis	1	Baik
5	Ruang Rapat	4	Baik
6	Ruang Sekretariat	1	Baik
7	Ruang Bidang	3	Baik
8	Ruang Kepala UPTD	8	Baik
9	Ruang Sekretariat UPTD	8	Baik
10	Ruang Pertemuan	4	Baik
11	Gudang Bidang	4	Rusak Ringan
12	Gudang UPTD	8	Rusak Ringan
13	Record Room Kearsipan	1	Rusak Ringan
14	Gudang Arsip	1	Baik
15	Gedung Komisi Irigasi	1	Baik
16	Musholla	1	Baik
17	Workshop Alat Berat	1	Rusak Ringan
18	Rumah Dinas Workshop	5	Rusak Berat
19	Tempat Parkir UPTD	8	Rusak Ringan
20	Tempat Parkir Dinas	2	Baik
21	Koperasi	1	Baik
22	Dharma Wanita	1	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa sarana yang masih mengalami kerusakan, baik yang rusak ringan maupun rusak berat. Sarana yang mengalami rusak berat adalah Rumah Dinas Workshop, namun belum terdapat perencanaan untuk perbaikan prasarana tersebut, dikarenakan secara analisis skala prioritas belum mendesak untuk diperbaiki. Pada 5

(lima) tahun mendatang telah direncanakan perbaikan *Record Room* Arsip, yang nantinya akan digunakan sebagai Ruang Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, dan untuk prasarana lainnya belum ada rencana untuk perbaikan.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas tersedia sarana dan prasarana berupa alat berat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen

No	Nama Alat	No. Alat	Merk/Type	Th Pembuatan	No.Polisi	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavator	1	Caterpillar 320 D	2013	AA 1003 KBM	Rusak Ringan
2	Excavator	2	Komatsu PC 200 – 8	2016	-	Baik
3	Excavator	3	Komatsu PC 200 – 8	2016	-	Baik
4	Excavator	4	Komatsu PC 200 – 8	2017	-	Baik
5	Excavator	5	Komatsu PC 200 – 8	2017	-	Baik
6	Excavator	6	Komatsu PC 200 – 8	2017	-	Baik
7	Excavator	-	Komatsu PC 45 MR – 13	2016	-	Baik
8	Backhoe Loader	-	JCB 3 DX	2014	-	Rusak
9	Tandem Kap 4 Ton	1	HAMM HD 14 W	2012	-	Baik
10	Tandem Kap 4 Ton	2	GRACE LV2W 4	2014	-	Baik
11	Tandem Kap 4 Ton	3	HAMM HD 14 W	2016	-	Baik
12	Tandem Kap 4 Ton	4	HAMM HD 14 W	2016	-	Baik
13	Tandem Kap 2 Ton	-	HAMM HD 10 W	2015	-	Baik
14	Mesin Gilas 6 Ton	1	Barata	1975	-	Baik
15	Mesin Gilas 6 Ton	2	Barata	1976	AA 1005 KBM	Baik
16	Mesin Gilas 6 Ton	3	Barata	1976	AA 1006 KBM	Baik
17	Mesin Gilas 6 Ton	4	Barata	1983	AA 1007 KBM	Baik
18	Mesin Gilas 6 Ton	5	Barata	1987	AA 1012 KBM	Baik
19	Mesin Gilas 6 Ton	6	Barata	1987	AA 1013 KBM	Baik
20	Mesin Gilas 8 Ton	7	Bitelli TS 10	1984	AA 1011 KBM	Baik
21	Mesin Gilas 6 Ton	8	Barata	2002	AA 1015 KBM	Baik
22	Mesin Gilas 3 Ton	1	Barata MGB – 1	1980	AA 1008 KBM	Baik
23	Mesin Gilas 3 Ton	2	Barata MGB – 1	1982	AA 1010 KBM	Baik
24	Mesin Gilas 3 Ton	3	Barata MGB – 1	1983	AA 1009 KBM	Baik
25	Mesin Gilas 3 Ton	4	Barata MGB – 1	1996	AA 1014 KBM	Baik
26	Waker Kap 1 Ton	-	Barata MGD – 1000	2007	-	Baik
27	Waker Kap 0,5 Ton	-	Taikyouku	1984	-	Baik
28	Light Truck	-	Isuzu TLD 56	1995	AA 9561 D	Rusak Berat
29	Lubrication Truck	-	Isuzu JCR 360	1985	AA 9560 D	Rusak Berat
30	Dump Truck	-	Mercedes Benz 700 ATL	1996	B 9588 KQ	Rusak Berat
31	Flate Deck Truck	-	Hino	2014	AA 9593 GD	Baik
32	Flate Deck Truck	-	Isuzu FTR 90 P	2015	AA 9542 AD	Baik
33	Self Loader Truck	-	Hino FL8JNKA FL 235 J	2015	AA 9599 GD	Baik
34	Aspal Mixer	-	FREDDY MIX	2014	-	Baik
35	Genset Kap 30 KVA	-	Sinano	1984	-	RusakBerat
36	Vib.Plate Comp	1	Barata MP – 100	2007	AA 1016 KBM	Baik
37	Vib.Plate Comp	2	Barata MP – 101	2007	AA 1017 KBM	RusakBerat

38	Vib.Plate Comp	3	Tiger	2014	-	Baik
39	Truck Crane	-	Hino WU342R-KHMTJ/130 HD	2016	AA 9589 HD	Baik
40	Aspalt Finisher	-	Vogele/Super 700 – 3	2015	-	Baik

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Ketersediaan Alat Berat diharapkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Namun masih terdapat beberapa alat berat yang masih rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga perlu adanya pemeliharaan, dari data di atas yang paling mendesak dilakukan perbaikan adalah *loader* dan *excavator*, guna untuk penanggulangan bencana. Selain pemeliharaan, juga diperlukan pengadaan *Aspalt Mixing Plant Mini* untuk produksi aspal, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan rutin pada Unit Reaksi Cepat (URC) Bina Marga, dan perlu adanya pengadaan *Loader* untuk penanggulangan bencana.

Tabel 2.6
Peralatan Angkutan, Komputer dan Peralatan lainnya
Sampai Dengan Bulan April Tahun 2021

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	ALAT ANGKUTAN					
1	Gerobak Dorong	12			12	
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1			1	Kendaraan Roda 3
3	Pick Up	4	5	1	10	
4	Semi Trailer	1			1	
5	Sepeda Motor	64	29	4	97	
6	Station Wagon	4	3		7	
7	Truck + Attachment		1		1	
	KOMPUTER					
8	Hard Disk	2			2	
9	Internet	1			1	
10	Komputer Jaringan lainnya	1			1	
11	Lap Top	59		1	60	
12	Monitor	1			1	
13	P.C Unit	22			22	
14	Peralatan Jaringan lainnya	6			6	
15	Peralatan Jaringan lainnya				1	
16	Peralatan Jaringan lainnya				4	
17	Peralatan Personal Komputer lainnya	2			2	
18	Personal Komputer lainnya	4			4	
19	Plotter (Peralatan Mainframe)	1			1	
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	5	4	76	
21	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			2	
	LAIN-LAIN					

22	A.C. Window	56	5		61	
23	Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2			2	
24	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	1		5	
25	Alat Kantor Lainnya	3	1		4	
1	2	3	4	5	6	7
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain	90	9		99	
27	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3			3	
28	Amplifier	1			1	
29	Asphalt Finisher	1			1	
30	Asphalt Mixing Plant	1			1	
31	Audio Tape Reel Recorder		1		1	
32	Bangku Tunggu	3			3	
33	Brandkas	7	1		8	
34	Camera Electronic	10		1	11	
35	Camera film	1			1	
36	Camera Video	19		1	20	
37	Concrette Hammer Set	1			1	
38	Copy Board/Elektric White Board	1			1	
39	Digital Audio Taperecorder		2		2	
40	Dispenser				10	
41	Dump Truck			4	4	
42	electric generating set lainnya (dst)	10	1		11	
43	excavator lainnya (dst)	8		1	9	
44	Filing Cabinet Besi	42	29		71	
45	Fire Extinguisher	1			1	
46	Gergaji		5		5	
47	Global Positioning System	6			6	
48	Grating Generator Unit	2	1		3	
49	Handy Cam	2			2	
50	Handy Talky (HT)	4			4	
51	Jam Elektronik		1		1	
52	Kipas Angin	5	16		21	
53	Kompor Gas (Alat Dapur)	1			1	
54	Kursi Biasa	44	69		113	
55	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	26		33	
56	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6			6	
57	Kursi Kayu	58	6		56	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon	10			10	
59	Kursi Lipat	6	50		56	
60	Kursi Putar	23	23		46	
61	Kursi Rapat	138			138	
62	Kursi Tamu	8	17		22	
63	Layr LCD Projector/Infocus	2			2	
64	LCD Projector/Infocus	10			10	
65	Lemari Besi/Metal	16	10		26	
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		14		14	
67	Lemari Kaca		1		1	
68	Lemari Kayu	25	22		47	
69	Lemari Penyimpan		5		5	
70	Lemari Sorok		1		1	
71	Loudspeaker	8	1		9	
72	Meja 1/2 Biro	146	92		238	
73	Meja Kerja		2		2	
74	Meja Kerja Kayu	4			4	
75	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1			1	
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	

77	Meja Komputer	9	10		19	
78	Meja Maket/Peta	1			1	
79	Meja Rapat	48	11		59	
80	Meja Resepsionis	1			1	
81	Meja Tambahan		1		1	
82	Meja Telepon	1			1	
83	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	13		2	15	
84	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	5		1	6	
85	Mesin Pemotong Rumput	14			14	
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1	
87	mesin proses lainnya (dst)	8	9		17	
88	Mimbar/Podium	1			1	
89	Overhead Projector				1	
90	Papan Nama Instansi	6	1		7	
91	Peralatan Las Karbit		1		1	
92	Peralatan Permainan lainnya	1	1		2	
93	peralatan umum lainnya (dst)	5			5	
94	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)		10		10	
95	Pesawat Kip	1			1	
96	Pesawat Telephone	9	3	1	13	
97	Peta				2	
98	Pisau Lempar	1			1	
99	pompa lainnya (dst)	19			19	
100	Portable Water Pump	6			6	
101	Power Amplifier	1			1	
102	Pressure Vessel (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1			1	
103	Rak Besi	18	16		34	
104	Rak Kayu	11	12		23	
105	Rak Peralatan		2		2	
106	Rol Meter	5			5	
107	Sice				13	Ruang tamu Kadinas, Kabid dan UPTD
108	Sofa	2	1		3	
109	Sound System	1			1	
110	Stabilizer		2		2	
111	Tandam Roller	6			6	
112	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1		2	
113	Televisi	9	6	1	16	
114	Tempat Tidur Kayu	1			1	
115	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3			3	
116	Tool Cabinet Set		1		1	
117	Tool Kit Box		1		1	
118	Truck Loader + Attachment	1			1	
119	Truck Crane	1			1	
120	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3			3	
121	Unit Power Supply	1	1		2	
122	Video Printer	1			1	
123	Water Level Meter		1		1	
124	Wheel Loader + Attachment		2		2	
125	White Board	3	14		17	

126	White Board Electronic	1			1	
127	Wireless	2	1		3	
128	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1			1	
129	Yeengler/Trailer				1	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Berdasarkan data sarana dan prasarana di atas, nampak bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memiliki peralatan kerja yang cukup, namun dengan banyaknya pelatan yang dimiliki membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar juga, kondisi ini mendorong dilakukan efisiensi pemeliharaan peralatan kerja dan efektifitas penggunaan peralatan.

Data aset Gedung Perkantoran DPUPR Kabupaten Kebumen sebagaimana table berikut :

Tabel 2.7
Data Aset Gedung Perkantoran DPUPR Kabupaten Kebumen
Tahun 2021

No.	Nama Gedung	Luas tanah (M2)	Luas Bangunan (M2)	Tahun Renovasi Terakhir	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Kantor DPUPR	426 = Mushola dan Garasi 1.588 = Kantor DPUPR	988.7		V		
2.	Kantor UPT PJI Bedegolan	294	36		V		
3.	Kantor UPT PJI 2 (Kaligending)	Tanah Milik Pusat	35		V		
4.	Kantor UPT PJI 3 (Kedungsamak)	Tanah Milik Pusat	40		V		
5.	Kantor UPT PJI 4 (sempor)	Tanah Milik Pusat	45		V		
6.	Kantor UPT PBPJJ (Gombong)	1658	137		V		
7.	Kantor UPT PBPJJ (Karanganyar)	1001	180,5		V		
8.	Kantor UPT PBPJJ (Kebumen)	370			V		
9.	Kantor UPT PBPJJ (Kutowinangun)	804	929,68		V		
10.	Workshop	14.329	1176			V	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan menempati beberapa gedung sesuai peruntukannya. Gedung Utama

di Jalan HM. Sarbini terdiri atas Gedung kantor dan musholla. Adapun Gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar di delapan lokasi serta satu lokasi tempat penyimpanan alat berat dan peralatan lainnya berikut garasi kendaraannya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, meliputi :

1. Jalan

Secara geografis Kabupaten Kebumen memiliki lokasi yang strategis karena berada di jalur selatan Provinsi Jawa Tengah. Jalur Nasional Jawa Bagian Selatan tersebut menghubungkan antara Bandung-Yogyakarta-Surabaya yang melewati Kabupaten Kebumen. Posisi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kebumen, oleh karena itu dukungan sarana dan prasarana jalan yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan trensportasi perlu mendapatkan perhatian serius.

Jalur selatan yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen merupakan Jalan Nasional sepanjang 54,19 Km dan Jalan Provinsi sepanjang 30,09 Km, sedangkan panjang Jalan Kabupaten yang menghubungkan pusat/ibukota Kabupaten Kebumen dengan seluruh Wilayah/ibukota Kecamatan sepanjang 960,358 Km. Kondisi Jalan Kabupaten Kebumen pada tahun 2020, sepanjang 365,191 Km (38,027 %) dengan kondisi baik, sepanjang 337,400 Km (35,133 %) dengan kondisi sedang, sepanjang 124,364 Km (12,950 %) dengan kondisi rusak ringan, dan sepanjang 133,403 Km (13,891 %) dengan kondisi rusak berat.

Tabel 2.8

NO	URAIAN	PANJANG JALAN (Km)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Kondisi Baik	590,56	508,71	523,36	525,233	365,191	365,191
2	Kondisi Sedang	89,720	177,45	160,11	187,625	337,400	337,400
3	Kondisi Rusak Ringan	126,57	121,13	114,24	121,138	124,364	124,364
4	Kondisi Rusak Berat	168,30	153,07	162,65	126,362	133,403	133,403
5	Panjang Jalan Secara Keseluruhan	975,15	960,36	960,36	960,358	960,358	960,358
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	60,56	52,97	54,50	54,69	38,027	38,027

7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	9,20	18,48	16,67	19,54	35,133	35,133
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	12,97	12,61	11,90	12,61	12,950	12,950
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	17,25	15,94	16,94	13,16	13,891	13,891

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

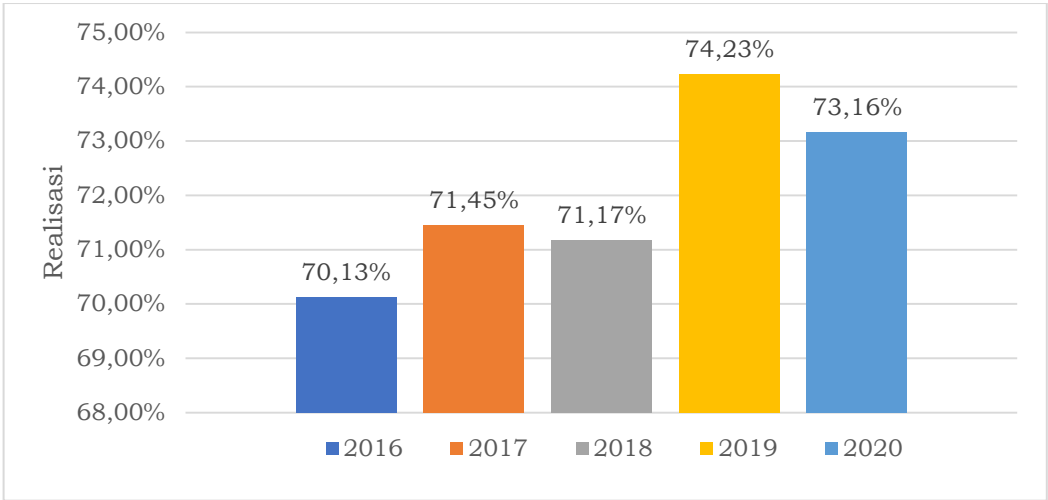
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2016-2020

Jumlah panjang jalan kondisi baik pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding kondisi jalan pada tahun 2019 antara lain disebabkan :

- a. Masih belum validnya hasil survey oleh konsultan survey kondisi jalan terkait kriteria jalan kondisi baik dan kondisi sedang. Hal ini disebabkan antara lain kegiatan survey kondisi jalan sesuai ketentuan SNI dengan alat PARVID yang baru pertama kali dilaksanakan.
- b. anggaran pemeliharaan rutin jalan belum optimal digunakan untuk memelihara agar jalan tetap dalam kondisi baik, sehingga kondisi jalan mengalami penurunan menjadi kriteria kondisi sedang.
- c. Anggaran pemeliharaan rutin belum optimal digunakan untuk pemeliharaan rutin jalan karena sebagian anggaran digunakan untuk pemeliharaan jalan yang sifatnya berkala akibat kerusakan jalan sudah masuk kondisi rusak ringan/rusak berat, perbaikan kerusakan akibat bencana alam, penambahan bangunan pelengkap seperti talud, saluran dan plat deker.

Gambar 2.2

**Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Jenis permukaan jalan kabupaten sebagian besar sudah berupa aspal 732,51 Km (76,27 %), beton 104,97 Km (10,93 %), kerikil 87,74 Km (9,14 %), tanah 35,14 Km (3,66 %). Adanya penurunan kualitas jalan terkait dengan kurang proporsionalnya anggaran untuk penanganan pemeliharaan jalan dibandingkan dengan tingkat penurunan kualitas jalan.

Tabel 2.9
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah
1	Panjang (Km)	732,51	104,97	87,74	35,14
2	Prosentase (%)	76,27	10,93	9,14	3,66

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Jalan kabupaten yang masih dalam kondisi kerikil atau tanah terutama terletak di wilayah kecamatan Karanggayam, Sempor, Sadang, Karangsambung, Rowokele, dan Buayan yang memiliki tipikal dataran tinggi. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pembangunan/ peningkatan ruas jalan tersebut atau sudah lama tidak dilaksanakan pemeliharaan berkala sehingga mengalami kerusakan berat.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2016 terdapat perubahan Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten, yang semula berdasarkan SK Bupati nomor 050/528/KEP/2015 tentang Jalan Kabupaten sepanjang 975,15 Km yang diubah dengan SK Bupati nomor 050/889 dengan Panjang jalan kabupaten menjadi 960,358 Km. Penurunan tersebut antara lain disebabkan downgrade status jalan yang semula jalan kabupaten yang diubah menjadi status jalan desa.

Kondisi tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kondisi jalan yang belum optimal. Apabila kondisi tidak segera ditangani dengan baik maka akan timbul dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan pengguna jalan dan berpengaruh terhadap perekonomian di Kebumen. Sarana dan prasarana jalan yang baik dapat menunjang pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kebumen serta dapat membuka akses dalam kegiatan sektor perdagangan maupun transportasi.

Pada Ruas Jalan Lingkar Utara (JLU) terdapat 12 ruas jalan dengan total 96,972 Km. Ruas-ruas jalan tersebut adalah : Ruas Jalan Kenteng-

Ketileng sepanjang 11,210 Km, Ruas Jalan Sedayu-Lawangawu sepanjang 11,500 Km, Ruas Jalan Pagebangan-Somagede sepanjang 10,700 Km, Ruas Jalan Wonotirto-Gunungsari sepanjang 6,272 Km, Ruas Jalan Kebakalan-Giritirto sepanjang 5,082 Km, Ruas Jalan Karangsambung-Sadangwetan sepanjang 12,520 Km, Ruas Jalan Krakal-Wadasmalang sepanjang 5,000 Km, Ruas Jalan Wadasmalang-Sadangkulon sepanjang 10,280 Km, Ruas Jalan Wadasmalang-Slepi sepanjang 5,000 Km, Ruas Krakal-Pujotirto sepanjang 5,158 Km, Ruas Pujotirto-Manisan sepanjang 3,200 Km, dan Ruas Sawangan-Padureso sepanjang 11,050 Km.

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dibutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang baik. Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, Jalan Kabupaten sepanjang 960,358 km (berdasarkan SK. Bupati No 050/889 tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten) dan jalan non-status sepanjang 60 km.

Pada ruas-ruas jalan arteri khususnya di Kota Kebumen yang menghubungkan kota atau jalur regional namun saat ini juga berfungsi sebagai jalur internalkota. Himpitan fungsi yang demikian sedikit banyak menyebabkan jalan tersebut dipadati oleh pergerakan regional maupun local, pada akhirnya kecepatan menjadi rendah, sedangkan untuk menghubungkan Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DI Yogyakarta merupakan Jalan Nasional dengan kondisi baik.

Tabel 2.10
Panjang dan Proporsi Jalan Provinsi di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	7,85	29,67	28,84	29,67	28,57
2	Kondisi Sedang	21,82	0,00	0,83	0,00	0,50
3	Kondisi Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
4	Kondisi Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jalan secara keseluruhan	29,67	29,67	29,67	29,67	29,67
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	26,46	100,00	97,20	100,00	96,29
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	73,54	0,00	2,80	0,00	1,69
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Proporsi Kondisi Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------------------	------	------	------	------	------

Sumber: Dinas PUBMCK Prov. Jawa Tengah, 2021

Kondisi jalan provinsi yang berada di Kabupaten Kebumen secara umum sudah baik, yang perlu dilakukan operasional pemeliharaan rutin.

Tabel 2.11
Panjang dan Proporsi Jalan Nasional di Kabupaten Kebumen
Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Panjang Jalan (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	31,70	35,50	27,80	41,40	32,20
2	Kondisi Sedang	17,6	15,70	18,90	9,50	19,70
3	Kondisi Rusak Ringan	4,70	2,80	7,30	3,10	2,10
4	Kondisi Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jalan secara keseluruhan	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	58,70	65,74	51,48	76,67	59,63
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	32,60	29,07	35,00	17,59	36,48
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	8,70	5,19	13,52	5,74	3,89
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Satker PJN Wilayah I Prov. Jawa Tengah, 2021

Jalan Nasional yang melewati Wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang 60,72 Km, terdiri atas Jalan Batas Banyumas-Kebumen sepanjang 30,35 Km, Jalan Lingkar Selatan Kebumen sepanjang 9,11 Km dan Jalan Batas Kota Kebumen-Prembun (Jembatan Gebang) sepanjang 12,75 Km, Jalan Menuju Purworejo sepanjang 4,22 Km dan Jalan Prembun-Kutoarjo sepanjang 4,89 Km.

Jalan Provinsi yang melewati Wilayah Kabupaten Kebumen sepanjang 30,09 Km, terdiri atas Ruas Jalan Prembun-Wadaslintang sepanjang 16,56 Km dan Ruas Jalan Gombong-Sempor-Ketileng sepanjang 13,53 Km.

Jalan Non-Status dengan total panjang 60,00 Km terdiri atas Ruas Jalan Wawar-Buluspesantren sepanjang 18,60 Km, Ruas Jalan Buluspesantren-Karangbolong sepanjang 24,40 Km dan Ruas Jalan

Karangbolong-Bodo sepanjang 17,00 Km. Jalan non status tersebut di atas adalah jalan yang tidak termasuk ke dalam ruas jalan sesuai Surat Keputusan Bupati no 050/889 tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dan belum termasuk ke dalam status jalan propinsi. Pemeliharaan jalan non status tersebut selama ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, namun dengan anggaran yang terbatas.

Mengingat ruas jalan non status cukup panjang, apabila akan menjadi status ruas jalan Kabupaten dan pemeliharanya dilaksanakan oleh Pemkab Kebumen tentu saja akan menambah beban anggaran pemerintah Kabupaten. Setelah jalan lintas selatan (JLS) dari Sungai Wawar-Jladri selesai, fungsi jalan non status hanya sebagai jalan alternatif apabila JLS mengalami hambatan. Mengingat keterbatasan anggaran Pemkab, jalan non status akan diusulkan menjadi status jalan provinsi mengingat jalan tersebut menjadi jalan penghubung antar kabupaten.

Dalam rangka pemeliharaan jalan dibentuk wilayah pemeliharaan yang dilaksanakan oleh UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	UPTD	WILAYAH KERJA KECAMATAN	PANJANG JALAN YANG DITANGANI
1	Gombong	Gombong, Sempor, Buayan, Rowokele, dan Ayah	219,67 km.
2	Karanganyar	Karanganyar, Karanggayam, Puring, Adimulyo, dan Kuwarasan	206,95 km
3	Kebumen	Kebumen, Pejagoan, Petanahan, Karangsambung, Alian, Sadang, Klirong, dan Sruweng	281,62 km
4	Kutowinangun	Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Padureso, Kutowinangun, Buluspesantren, Ambal, dan Poncowarno	252,13 km

Sumber : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 69 Tahun 2018

UPTD Pengawasan Bangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Kabupaten Kebumen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional pelaksanaan pengawasan bangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan, pemeliharaan sistem drainase perkotaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerjanya.

Tabel 2.13
Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan
Tahun 2016-2020

NO	KEWENANGAN	PANJANG JALAN (Km)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	60,72	60,72	60,72	60,72	60,72
2	Provinsi	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09
3	Kabupaten	975,15	960,358	960,358	960,358	960,358
4	Desa	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.254,01	1.254,01
5	Non Status	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kebumen, 2021

Untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera dibutuhkan penyediaan infrastruktur jalan yang baik. Infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 60,72 km, Jalan Provinsi sepanjang 30,09 km, Jalan Kabupaten sepanjang 960,358 km (berdasarkan SK. Bupati No 050/889 tahun 2017 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten) dan jalan non-status sepanjang 60 km.

2. Jembatan

Jembatan merupakan sarana dan prasarana penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Sebagai sarana penghubung, jembatan merupakan infrastruktur vital masyarakat dalam kerangka kesatuan dan persatuan bangsa. Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah membangun dan memelihara sebanyak 16 Unit, yaitu : Jembatan pada

Ruas Jalan Pagebangan-Somagede, Jembatan pada Ruas Jalan Lajerkidul-Sinungrejo, Jembatan pada Ruas Jalan Sidogede-Pejagatan, Jembatan pada Ruas Jalan Karangsambung-Sadangwetan, Jembatan pada Ruas Jalan Sinungrejo-Pekutan, Jembatan Kaligending-Karangrejo, Jembatan pada Ruas Jalan Kebakalan-Giritirto, Jembatan pada Ruas Jalan Peniron-Kebakalan, Jembatan pada Ruas Jalan Karangpoh-Aditirto, Jembatan pada Ruas Jalan Krakal-Pujotirto, Jembatan pada Ruas Jalan Krakal-Wadasmalang, Jembatan pada Ruas Jalan Poncowarno-Karangtengah, Jembatan pada Ruas Jalan Sirnobojo-Tlogopragoto, Jembatan pada Ruas Jalan Sidogede-Pejagatan, Jembatan pada Ruas Jalan Bagung-Sembirkadipaten, Jembatan pada Ruas Jalan Sembir-Pedorekan, Jembatan pada Ruas Jalan Adikarto-Kemujaan, Jembatan pada Ruas Jalan Mertokondo-Karangsambung.

Wilayah Utara Kabupaten Kebumen masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan bangunan jembatan sebagai sarana transportasi, pembangunan jembatan bertujuan untuk mempermudah mobilisasi masyarakat dalam menjangkau sumber-sumber ekonomi. Kondisi yang ada, Wilayah Utara Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya dapat dihubungkan dari timur ke barat, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan sehingga masyarakat masih menempuh jalur yang panjang dengan memutar untuk mobilisasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sudah memiliki perencanaan untuk pembangunan jembatan penghubung antar wilayah di waktu yang akan datang.

Tabel 2.14
Kondisi Jembatan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	306	462	424	484	375
2	Kondisi Sedang	23	20	21	21	320
3	Kondisi Rusak Ringan	6	13	13	10	17
4	Kondisi Rusak Berat	0	3	3	2	50
5	Jumlah Jembatan	432	719	719	719	762
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	70,83	64,26	63,14	67,32	49,21
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	22,69	20,31	20,58	20,86	41,99
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	6,25	12,66	13,21	9,46	2,23
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	0,23	2,78	3,06	2,36	6,56

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kebumen, 2021

3. Jaringan Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 8.621 ha dengan jumlah 172 buah Daerah Irigasi (PermenPUPR 14/PRT/ M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi). Selain itu Kabupaten Kebumen juga memiliki daerah irigasi kewenangan pusat yaitu DI Sempor (6.478 ha), DI Serayu (380 ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 ha). Terdapat juga daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu DI Buniayu (180 ha).

Tabel 2.15
Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen

NO	DAERAH IIRIGASI	LUAS (Ha)	PROSENTASE
1	172 DI Kabupaten Kebumen	8.621	23,2 %
2	Sempor (Pusat)	6.478	17,5 %
3	Wadaslintang (Pusat)	21.422	57,8 %
4	Serayu (Pusat)	380	1,0 %
5	Buniayu (Provinsi)	180	0,5 %
		37.081	100,00 %

Sumber: Dinas PUPR Kab. Kebumen, 2021

Sementara itu, jika dilihat kondisi jaringan irigasi Kabupaten Kebumen, pada tahun 2020 kondisinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik yang meningkat dari 68,18 persen di tahun 2019 menjadi 73,70 persen pada tahun 2020. Selain itu, proporsi jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat juga menurun dari 27,65 persen pada tahun 2019 menjadi 23,51 persen di tahun 2020.

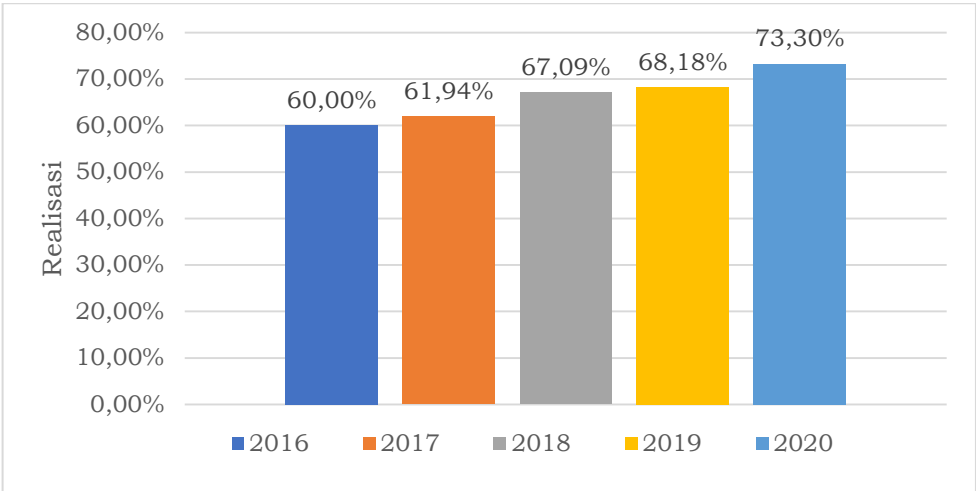
Tabel 2.16
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	184.41	184.41	184.418	184.41	184.41
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300

3	Irigasi Kondisi Baik (%)	60,0	61,94	67,09	68,18	73,30
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	3,79	2,76	3,34	3,20	1,73
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan (%)	1,05	1,12	1,06	0,97	1,28
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat (%)	35,16	34,18	28,51	27,65	23,69

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Gambar 2.3
Capaian Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Secara geografis capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebagaimana table diatas.

Tabel 2.17
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

NO	UPTD PJI	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA KECAMATAN	DAERAH IRIGASI
1	Bedegolan	Kutowinangun	Prembun, Mirit, Bonorowo, Ambal, Padureso, Kutowinangun, Poncowarno, dan sebagian Buluspesantren	Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Ambal, Padureso, Kutowinangun, Poncowarno, dan sebagian Buluspesantren

2	Kaligending	Kebumen	Kebumen, Poncowarno, sebagian Buluspesantren, Karangsembung, Sadang, Alian	Kecamatan Kebumen, Poncowarno, sebagian Buluspesantren, Karangsembung, Sadang, Alian
3	Kedung samak	Pejagoan	Pejagoan, Klirong, Petanahan, Puring, sebagian Adimulyo, sebagian Sruweng	Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur sampai Bangunan Sempor Timur.
4	Sempor	Karang anyar	Sruweng, Gombong, Karanganyar, sebagian Adimulyo, Kuwarasan, Buayan, Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, sebagian Puring	Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur sampai dengan Bangunan Sempor Timur

Sumber: DPUPR Kab. Kebumen, 2020

Wilayah administrasi daerah irigasi yang ditangani UPTD Kedungsamak meliputi desa Jabres dan Giwangretno; Saluran Sekunder Bersole dari Bangunan Bersole sampai dengan Bangunan Bersole meliputi desa Pakuran, Karang Sari dan Tanggeran. Saluran Sekunder Podourip dari Bangunan Podourip sampai dengan Bangunan Podourip meliputi desa Sidoarjo dan Menganti. Saluran Sekunder Adimulyo dari Bangunan Adimulyo sampai dengan Bangunan Adimulyo meliputi desa Sidoarjo.

Sedangkan Wilayah UPTD Sempor meliputi Saluran Sekunder Kejawang meliputi desa Tanggeran, Sruweng dan Karanggedang meliputi Sidoagung, Karang Jambu, Tanggeran, Karang Sari dan Karangpule. Dalam melaksanakan tugas pengendalian irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dibantu oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air yaitu suatu kelembagaan pengelola irigasi yang wajib dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Daftar P3A di Kabupaten Kebumen sebagaimana Lampiran I.

4. Drainase

Panjang drainase sekunder di Kabupaten Kebumen untuk jenis drainase sekunder tertutup maupun drainase sekunder terbuka tidak menunjukkan peningkatan, mengingat terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan drainase.

Pada Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen membangun dan memelihara darinase di beberapa lokasi, yaitu : Drainase di Desa Kutosari Kompleks Pondok Alhuda, Drainase pada Ruas Jalan Ronggowarsito Pejagoan, Drainase pada Pasar

Putihan Kecamatan Pejagoan, Drainase pada Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen, Drainase pada Kompleks Kantor Kecamatan Gombang, Drainase pada Desa Jatiroto Kecamatan Buayan, Drainase pada Desa Bendungan Kecamatan Kuwarasan, Drainase pada Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan, Drainase pada Ruas Jalan Adikarto-Kemujan (Desa Adimulyo, Kecamatan Adimulyo), Drainase pada Lingkungan Tugu Lawet, Drainase pada Jalan Indrakila, Drainase pada Jalan Sutoyo Kebumen, Drainase pada Desa Krakal Kecamatan Alian, Drainase pada Wilayah UPTD Prembun, Drainase pada Wilayah UPTD Kutowinangun, Drainase pada Wilayah UPTD Kebumen, Drainase pada Wilayah UPTD Karanganyar, Drainase pada Wilayah UPTD Gombang, Drainase pada Ruas Jalan Karangsambung-Sadang (LIPI Pasar Karangsambung), Drainase pada Kompleks Kecamatan Prembun, Drainase pada Ruas Jalan Giwangretno-Adikatro, Drainase pada Lingkungan Kota Gombang, Drainase pada Lingkungan Kota Karanganyar, Drainase pada Lingkungan Kota Kebumen, Drainase pada Lingkungan Kota Kutowinangun, Drainase pada Jalan Cincin Kota, Drainase Padeheman Kecamatan Kutowinangun, Drainase Plengguk Desa Purbowangi Kecamatan Buayan, Drainase Klapasawit Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren, Drainase Grogolpenatus Desa Grogolpenatus Kecaamatan Petanahan, Drainase Tunggalroso desa Tunggalroso Kecamatan Prembun, Drainase Pujodadi Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Drainase Banyuroto Kecamatan Adimulyo, dan Draianse Sidoluhur Desa Sidoluhur Kecamatan Ambal.

Tabel 2.18

Daftar Saluran Drainase yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
1	2	3	4	5
1	Aren	Jagasima-Pandanlor	Klirong	5,5
2	Bedogol	Bumiharjo-	Petanahan	2,2
3	Bengkelung	Redisari	Rowokele	0,5
4	Binangun	Bumiharjo-Trikarso	Sruweng	1,6
5	Bojongsari	Bojongsari	Alian	1,5
6	Badongan	Podoluhur-Kebadongan	Klirong	4
7	Buatan	Demangsari	Ayah	2
8	Era	Redisari	Rowokele	2
9	Garung	Jlegiwinangun	Kutowinangun	2
10	Jomboran	Purwosari-Tukinggedong	Puring	4,536
11	Jogomulyo	Jogomulyo-Purbowangi	Buayan	2,7

12	Kaligending	Krandegan	Puring	0,65
13	Kaliori	Rowokele	Rowokele	2,74
14	Kebantengan	Tambakagung-Karangglonggong	Klirong	2,5
15	Kedungkeji	Kretak	Rowokele	1,5
16	Kenteng	Kenteng	Sempor	2
17	Klepupayung	Sugiharwas	Adimulyo	2
18	Krandegan	Krandegan	Puring	0,665
19	Krasak	Jatimalang	Klirong	2
20	Lumpang	Bumiagung	Rowokele	1,5
21	Munggu	Munggu-Tambakmulyo	Petanahan, Puring	10
22	Pacor	Jemur Clowok	Kebumen	2
23	Rangga Ula	Pringtutul	Rowokele	2,5
1	2	3	4	5
24	Siwarak	Jatiroto	Buayan	2,5
25	Semali	Semali	Sempor	1
26	Sosogan	Seling	Karangsambung	2,5
27	Sokadana	Kajoran	Karanggayam	2
28	Tanjungrejo	Tanjungrejo-Sangubanyu	Buluspesantren	2,75
29	Tembelang	Mangunweni	Ayah	1,6
30	Widakan	Purwoharjo	Puring	0,95
31	Kalibeki	Karangsari	Buayan	0,381
			Total	

Sumber : Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 611/216/Kep/2016, Tentang Daerah Irigasi Dan Saluran Drainase Yang Menjadi Kewenangan Pemkab Kebumen

Tabel 2.19
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kebumen
Tahun 2020

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	SATU AN	BENTUK PENAMPANG SALURAN	DIMENSI			KONDISI		FREKUENSI PEMELIHARAAN DALAM SATU TAHUN
				P	B**)	H***)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kali Tembana Utara	m							
	Saluran Kemitir Kanan	m	Segi Empat	1312	0,5	0,63	V		2X
	Saluran Kemitir Kiri	m	Segi Empat	612	0,5	0,63	V		2X
2	Saluran Sarbini Barat	m	Segi Empat	1313	0,6	0,6	V		2X
3	Kali Jetis	m							
	Saluran Karangsambung Kanan	m	Segi Empat	1534	1,5	0,5	V		2X
	Saluran Karangsambung Kiri	m	Segi Empat	1434	1,5	0,5	V		2X
	Saluran Tendean Kanan	m	Segi Empat	7141	4,5	2	V		2X
	Saluran Tendean Kiri	m	Segi Empat	1313	0,6	0,5	V		2X
4	Saluran Irigasi Kaligending	m							
	Saluran Prumpung Kiri	m	Segi Empat	1283	0,5	0,6	V		2X
	Saluran Prumpung Kanan	m	Segi Empat	1032	0,4	0,4	V		2X
5	Kali Krasak	m							

	Saluran Sarbini kiri	m	Segi Empat	1303	0,5	0,6	V		2X
	Saluran Sarbini kanan	m	Segi Empat	1303	0,5	0,6	V		2X
	Saluran Tanimbar	m	Segi Empat	881	0,3	0,3	V		2X
	Saluran Panjaitan	m	Segi Empat	1032	0,4	0,4	V		2X
	Saluran Nusa Tenggara Kanan	m	Segi Empat	1183	0,4	0,5	V		2X
	Saluran Alun-alun utara	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Mayjend Sutoyo Kanan	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Letjend S. Parman	m	Segi Empat	1483	2	0,8	V		2X
	Saluran Alun-Alun Timur	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Pahlawan Kanan	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Pahlawan Kiri	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Alun-Alun Selatan	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
6	Kali Luk Ulo	m							
	Saluran Klenteng	m	Segi Empat	1283	0,5	0,6	V		2X
	Saluran Pemuda	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
	Saluran Kenanga	m	Segi Empat	1225	0,6	0,5	V		2X
	Saluran Jalan Kereta Ka	m	Segi Empat	1247	0,7	0,5	V		2X
	Saluran Pabrik Genting 1	m	Segi Empat	1200	0,6	0,45	V		2X
	Saluran Pabrik Genting 2	m	Segi Empat	1151	0,6	0,45	V		2X
7	Saluran Ahmad Yani	m							
	Saluran Tentara Pelajar Ka	m	Segi Empat	1249	0,4	0,6	V		2X
	Saluran Tentara Pelajar Ki	m	Segi Empat	1296	0,4	0,65	V		2X
8	Kali Pengantenan	m							
	Saluran Cendrawasih	m	Trapesium	1437	0,8	0,65	V		2X
	Saluran Ahmad Yani 2	m	Segi Empat	1378	0,5	0,7	V		2X
	Saluran Sijago	m	Segi Empat	1378	0,5	0,7	V		2X
9	Saluran Tentara Pelajar	m							
	Saluran Kolopaking Kiri	m	Segi Empat	1264	0,4	0,6	V		2X
	Saluran Kolopaking Kanan	m	Segi Empat	1264	0,4	0,6	V		2X
	Saluran Kusuma Kiri	m	Segi Empat	1414	0,6	0,7	V		2X
	Saluran Kusuma Kanan	m	Segi Empat	1341	0,5	0,65	V		2X
	Saluran Pahlawan	m	Segi Empat	1483	0,6	0,8	V		2X
10	Kali Bakung	m							
	Saluran Semeru	m	Segi Empat	1303	0,4	0,4	V		2X
	Saluran Alian 1	m	Segi Empat	1663	0,5	0,6	V		2X
	Saluran Alian 2	m	Segi Empat	2538	2,3	1	V		2X
	Saluran Pabrik Genting 3	m	Segi Empat	1151	0,6	0,45	V		2X

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kebumen Tahun 2020, relatif baik

Tabel 2.20
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Prembun

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	SATUAN	BENTUK PENAMPANG SALURAN	DIMENSI			KONDISI		FREKUE NSI
				P	B**)	H***)	Berf ung si	Tidak Berfu ngsi	PEMELIH ARAAN (1 TAHUN)
1	Drainase Alun-Alun Barat	M	Segi Empat	89	0,6	0,8	V		2X
2	Drainase Alun-Alun Timur	M	Segi Empat	89	0,6	0,8	V		2X
3	Drainase Jalan Raya Timur Utara	M	Segi Empat	900	0,8	1,3	V		2X
4	Drainase Jalan Raya Timur Selatan	M	Segi Empat	712	0,9	1,1	V		2X
5	Drainase Jalan Raya Tengah Utara	M	Segi Empat	186	0,9	1,3	V		2X
6	Drainase Jalan Raya Tengah Selatan	M	Segi Empat	280	0,9	1,1	V		2X
7	Drainase Jalan Raya Barat Utara	M	Segi Empat	330	0,9	1,1	V		2X
8	Drainase Jalan Raya Barat Selatan	M	Segi Empat	430	0,9	0,9	V		2X
9	Drainase Jalan Raya Barat Terminal	M	Segi Empat	200	0,9	0,9	V		2X
10	Drainase Jalan KA Barat	M	Segi Empat	56	0,5	0,75	V		2X
11	Drainase Jalan KA Timur	M	Segi Empat	56	0,9	1,1	V		2X

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Prembun Tahun 2020, relatif baik

Tabel 2.21
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kutowinangun

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	SATU AN	BENTUK PENAMPANG SALURAN	DIMENSI			KONDISI		FREKU ENSI PEMELI HARAAN DALAM SATU TAHUN
				P	B**)	H***)	BERFUNGSI	TIDAK BERFU NGS	
1	Drainase Jalan Dwikora Timur	m	Segi Empat	256	0,8	0,9	BERFUNGSI		2X
2	Drainase Jalan Dwikora Barat	m	Segi Empat	256	0,8	0,9	BERFUNGSI		2X
2	Drainase Jalan Raya Timur Utara	m	Segi Empat	386	0,9	1,2	BERFUNGSI		2X
4	Drainase Jalan Raya Timur Selatan	m	Segi Empat	423	0,9	1,1	BERFUNGSI		2X
5	Drainase Jalan Raya Tengah Utara	m	Segi Empat	268	0,9	1,1	BERFUNGSI		2X
6	Drainase Jalan Raya Tengah Selatan	m	Segi Empat	247	0,9	1,1	BERFUNGSI		2X
7	Drainase Jalan Raya Barat Utara	m	Segi Empat	379	0,9	1,1	BERFUNGSI		2X
8	Drainase Jalan Raya Barat Selatan	m	Segi Empat	379	0,9	1,1	BERFUNGSI		2X
9	Drainase Jalan Stasiun KA Barat	m	Segi Empat	371	0,8	0,9	BERFUNGSI		2X

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Kutowinangun Tahun 2020, relatif baik

Tabel 2.22
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Karanganyar

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	SATUAN	BENTUK PENAMPANG SALURAN	DIMENSI			KONDISI		FREKUENSI PEMELIHARAAN DALAM SATU TAHUN
				P	B**)	H***)	BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI	
1	Drainase Jalan Tentara Pelajar Utara	m	Segi Empat	279	0,8	0,9	V		2X
2	Drainase Jalan Tentara Pelajar Selatan	m	Segi Empat	279	0,8	0,9	V		2X
2	Drainase Jalan Raya Timur Utara	m	Segi Empat	200	1,5	1,1	V		2X
4	Drainase Jalan Raya Timur Selatan	m	Segi Empat	200	1	1,1	V		2X
5	Drainase Jalan Raya Barat Utara	m	Segi Empat	307	0,8	1,1	V		2X
6	Drainase Jalan Raya Barat Selatan	m	Segi Empat	307	0,8	1,1	V		2X
7	Drainase Jalan Kartini Timur	m	Segi Empat	214	0,6	0,9	V		2X
8	Drainase Jalan Kartini Barat	m	Segi Empat	239	0,6	0,9	V		2X
9	Drainase Jalan Kaleng Timur	m	Segi Empat	150	0,6	0,9	V		2X
10	Drainase Jalan Kaleng Barat	m	Segi Empat	179	0,6	0,9	V		2X
11	Drainase Jalan Kemakmuran Utara	m	Segi Empat	248	0,8	0,9	V		2X
12	Drainase Jalan Kemakmuran Selatan	m	Segi Empat	285	0,8	0,9	V		2X

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Karanganyar Tahun 2020, relatif baik

Tabel 2.23
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Gombong

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	SATUAN	BENTUK PENAMPANG SALURAN	DIMENSI			KONDISI		FREKUENSI PEMELIHARAAN DALAM SATU TAHUN
				P	B**)	H***)	BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI	
1	Drainase Jalan Yos Sudarso Barat Utara	m	Segi Empat	765	0,6	1,1	V		2X
2	Drainase Jalan Yos Sudarso Barat Selatan	m	Segi Empat	765	0,8	1,04	V		2X
3	Drainase Jalan Yos Sudarso Barat Selatan (r)	m	Segi Empat	372	0,6	1,02	V		2X
4	Drainase Jalan Yos Sudarso Timur Utara	m	Segi Empat	471	0,8	0,9	V		2X
5	Drainase Jalan Yos Sudarso Timur Selatan	m	Segi Empat	391	0,8	0,9	V		2X
6	Drainase Jalan Kartini Utara	m	Segi Empat	230	0,6	0,94	V		2X
7	Drainase Jalan Kartini Selatan	m	Segi Empat	318	0,8	0,9	V		2X
8	Drainase Jalan Dewi Sartika Timur	m	Segi Empat	121	0,6	0,93	V		2X
9	Drainase Jalan Kantor Pos Selatan	m	Segi Empat	327	0,6	0,98	V		2X

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan di Kota Gombong Tahun 2020, relatif baik

5. Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum adalah salah satu kebutuhan hidup dasar manusia. Pelayanan air minum di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, dan masyarakat. Sedangkan swasta belum terlibat dalam melakukan pelayanan air minum. PDAM melayani penyediaan air minum perkotaan sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melayani pembangunan sistem penyediaan air minum pedesaan.

Tabel 2.24
Jumlah Rumah Tangga yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

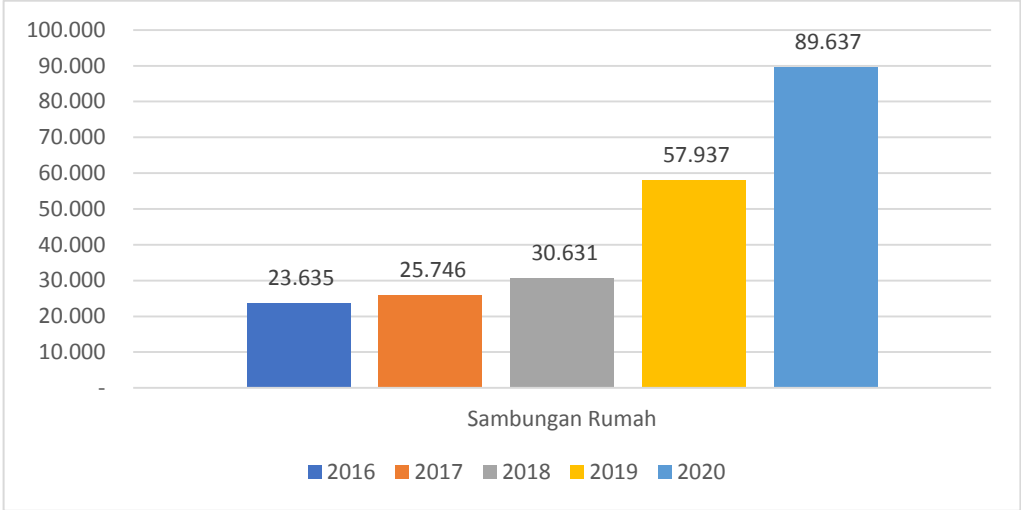
Tahun	Jumlah Rumah Tangga Mengakses SPAM Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Mengakses PDAM	Estimasi Jumlah Rumah Tangga	Akses Air Minum Perpipaan
2016	7.777	23.539	344.667	9,09%
2017	11.531	25.563	345.494	10,74%
2018	13.813	29.033	346.323	12,37%
2019	16.972	30.678	347.155	13,73%
2020	20.764	32.681	347.988	15,36%

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Prosentase Proporsi Rumah Tangga dengan akses sarana air minum di perkotaan maupun perdesaan meningkat dari tahun ke tahun. Sistem air minum untuk masyarakat berupa air minum perpipaan untuk 26 Kecamatan telah mencapai 89.637 Sambungan Rumah penerima manfaat. Kegiatan Pengelolaan Sistem Air Minum dikelola melalui Program DAK, MBR, dan APBD.

Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang dilayani sistem perpipaan air pada tahun 2016 sebesar 23.635 Sambungan Rumah dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 89.637 Sambungan Rumah. Peningkatan terbesar terjadi pada kurun waktu 2019-2020 dengan peningkatan sebesar 31.700 Sambungan Rumah.

Gambar 2.4
Jumlah Rumah Tangga Yang Dilayani Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

6. Tata Ruang

Dalam rangka mengikuti dinamika pembangunan dan amanat UU Tata Ruang, Kabupaten Kebumen melakukan Proses Penyusunan Revisi RTRW. Pada tahun 2019, Dokumen Revisi RTRW sudah memperoleh rekomendasi peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, kemudian pada tahun 2020 diharapkan untuk memperoleh Persetujuan Substansi Gubernur serta Kementerian ATR/BPN, sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Revisi RTRW pada tahun 2021 atau 2022. Dalam Dokumen Revisi RTRW, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen bertujuan mewujudkan wilayah kabupaten yang mandiri secara ekonomi dan merata pelayanannya melalui pengembangan agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan, aman, nyaman, dan produktif, kemudian dijabarkan menjadi rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana kawasan strategis wilayah.

Tabel 2.25
Kondisi Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2020

NO	URAIAN	DOKUMEN EVALUASI	PENINJAU AN KEMBALI	MATERI TEKNIS	REKOME N-DASI PETA BIG	RROSES REKOMEND ASI GUBERNUR	PROSES PERSUB ATR	PROSES EVALUASI GUBERN UR	PERDA BARU
1	Revisi RTRW Kebumen	√	√	√	√	√	-	-	-
2	RDTR Perkotaan Kebumen	-	-	√	-	-	-	-	-
3	RDTR Perkotaan	-	-	√	-	-	-	-	-

	Gombang								
4	RDTR Perkotaan Karanganyar	-	-	√	-	-	-	-	-
5	RDTR Perkotaan Prembun	-	-	-	-	-	-	-	-
6	RDTR Perkotaan Kutowinangun	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kajian Strategis Tata Ruang - Kota - Pusaka - Geopark - Kawasan Industri	-	-	√	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

7. Air Baku (Embung)

Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau). Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Tabel 2.26
Daftar Waduk, Longstorage dan Embung di Kabupaten Kebumen
Tahun 2020

NO.	NAMA WADUK/EMBUNG	LOKASI	SUMBER AIR	KAPASITAS (M3)	MANFAAT	TAHUN PEMBUATAN
1	Waduk Sempor	Sempor, Sempor	Air Sungai, Air Hujan	52.000.000	Irigasi dan Air Baku	1966
2	Embung DAS Kalong/Penimbun	Penimbun, Karanggayam	Air Sungai, Air Hujan	28.100	Air Baku	2010
3	Embung Wonosari	Wonosari, Sadang	Air Hujan	11.900	Durian, Pertanian	2011
4	Embung Cangkring	Cangkring, Sadang	Mata Air, Air Hujan	10.800	Durian, Pertanian	2011
5	Embung Seboro	Seboro, Sadang	Mata Air, Air Hujan	8.700	Kelengkeng, Durian	2010
6	Embung Bulurejo	Bulurejo, Ayah	Air Sungai, Air Hujan	10.000	Pertanian	2015
7	Embung Kedungweru	Kedungweru, Ayah	Air Sungai, Air Hujan	15.000	Perikanan	2014
8	Embung Seling	Seling, Karangsambung	Air Hujan	10.000	Hortikultura	2017
9	Embung Kalisana	Kalisana, Karangsambung	Air Hujan	6.650	Hortikultura	2017
10	Embung Banjararjo	Banjararjo, Ayah	Air Hujan	5.750	Hortikultura	2017
11	Embung Sadangwetan	Sadangwetan, Sadang	Air Hujan	1.700	Hortikultura	2017

12	Embung Kalirejo	Kalirejo, Karanggayam	Air Hujan	1.500	Tembakau	2017
13	Embung Pandansari	Pandansari, Sruweng	Air Hujan	14.000	Hortikultura	2018
14	Embung Srati	Srati, Ayah	Air Hujan	8.500	Hortikultura	2018
15	Embung Triwarno	Triwarno, Kutowinangun	Air Hujan	4.500	Hortikultura	2018
16	Embung Tlepok	Tlepok, Karangsambung	Air Hujan	6.500	Hortikultura	2018
17	Embung Penusupan	Penusupan, Sruweng	Air Hujan	4.000	Hortikultura	2018
18	Longstorage Sidomukti	Sidomukti, Kuwarasan	Drainase, Sungai	7.000	Pengendali Banjir	2019
19	Embung Peniron	Peniron, Pejagoan	Air Hujan	7.000	Hortikultura	2019
20	Longstorage Rahayu	Rahayu, Padureso	Drainase	20.000	Pertanian	2020
21	Embung Tugu	Tugu, Buayan	Air Hujan	11.000	Hortikultura	2020

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

8. Pertanahan

Kinerja pertanahan dapat dilihat dari permohonan sertifikat di Kabupaten Kebumen yang cenderung meningkat selama kurun waktu 2016-2020. Peningkatan tersebut meliputi permohonan hak milik, hak pakai, dan hak tanggungan.

Sementara itu, trend penyelesaian permohonan sertifikat juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan penyelesaian meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hak tanggungan. Persentase luas lahan bersertifikat masih rendah meskipun terdapat peningkatan yang disebabkan kesadaran masyarakat dalam mengurus legalitas tanah masih cukup rendah.

Tabel 2.27
Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sertifikat
di Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020

No	Jenis Sertifikat	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permohonan					
	a. Hak milik	1.667	1.507	1.423	2.405	34.063
	b. Hak guna bangunan	279	205	282	361	271
	c. Hak pakai	71	71	285	40	857
	d. Hak tanggungan	3.615	3.615	3.582	4.085	3.640
	e. Roya	2.010	2.010	2.160	2.263	2.139
2	Penyelesaian					
	a. Hak milik	1.398	1.398	1.166	2.375	33.244
	b. Hak guna bangunan	168	168	306	350	255
	c. Hak pakai	85	85	292	35	864
	d. Hak tanggungan	3.642	3.642	3.538	4.134	3.627
	e. Roya	2.034	2.034	2.130	2.157	2.100

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2021

Kinerja penanganan dan kebijakan pertanahan Kabupaten Kebumen selama 2016-2020 diantaranya koordinasi dan fasilitasi Program Nasional Agraria (Prona) bagi usaha kecil menengah (UKM); program sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); program sertifikasi tanah bagi nelayan melalui Program Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS); serta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); serta fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu. Program PTSL merupakan satu program strategis nasional dalam rangka legalisasi aset hak-hak atas tanah masyarakat, dengan target nasional pada 2025 mencapai seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia harus sudah terdaftar dan bersertifikat.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat penyelesaian masih lebih rendah dengan permohonannya, hal ini disebabkan karena perhitungan permohonan yang masuk berdasarkan tahun berjalan sesuai dengan jumlah berkas yang masuk di tahun tersebut, sedangkan untuk permohonan yang masuk memerlukan waktu penyelesaian yang berbeda-beda, contohnya permohonan hak milik terdiri dari:

- a. Permohonan penerbitan sertifikat dari Letter C, membutuhkan waktu kurang lebih 98 hari, selama waktu tersebut proses yang berjalan adalah pengukuran pengumuman, dan penerbitan sertifikat. Jangka waktu tersebut belum termasuk apabila terdapat kendala dan permasalahan di lapangan.
- b. Pemecahan dan penggabungan sertifikat, membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari, termasuk proses pengukuran dan penerbitan sertifikatnya.
- c. Peralihan hak (meliputi jual beli, hibah, waris, APHB, lelang) memerlukan waktu kurang lebih 5 hari.

Tabel 2.28
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKU	Tagret Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Prosentase Capaian					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Capaian Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		70,94 %	58,75 %	61,68 %	64,77 %	67,85 %	70,94 %	70,94 %	60,56 %	52,97 %	54,50 %	74,23 %	60,01 %	60,01 %	124,25 %	102,75 %	100,24 %	136,20 %	121,93 %	121,93 %
2	Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		80,00 %	60,00 %	63,00 %	67,00 %	72,00 %	77,00 %	80,00 %	60,50 %	61,94 %	65,30 %	68,18 %	73,30 %	73,30 %	93,08%	91,09%	91,97%	92,14%	95,19%	95,19%
3	Cakupan Pelayanan Air Bersih	100,00%	100,00%	68,69 %	75,69 %	82,60 %	89,43 %	96,18 %	100,00%	86,38 %	87,16 %	89,16 %	85,14 %	86,37 %	86,37 %	125,75 %	115,15 %	107,94 %	95,20%	89,97%	89,97%

Tabel 2.29
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran)*000					Realisasi)*000					Persentase antara Realisasi dan Anggaran					Rerata Pertumbuhan)*000	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	531.717.718	360.919.673	272.426.132	236.611.687	196.837.974	475.266.752	282.256.705	221.110.501	202.726.701	180.444.338	89,38%	78,20%	81,16%	85,68%	91,67%	319.702.637	308.412.444
Belanja Tidak Langsung	13.522.435	18.888.403	18.862.882	17.675.474	17.543.356	13.169.250	17.383.241	17.900.644	16.204.268	16.964.684	97,39%	92,03%	94,90%	91,68%	96,70%	17.298.510	17.227.873
Penyediaan jasa surat menyurat	2.750	3.025	2.980	3.218	2.620	1.907	1.929	2.364	2.499	2.538	69,36%	63,75%	79,33%	77,64%	96,87%	2.919	2.750
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	174.930	180.323	200.000	193.840	204.582	147.577	145.713	145.631	166.433	175.360	84,36%	80,81%	72,82%	85,86%	85,72%	190.735	185.264
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	1.115.000	419.800	400.000	604.636	414.605	1.113.565	347.782	369.487	548.182	376.604	99,87%	82,84%	92,37%	90,66%	90,83%	590.808	590.521
Penyediaan jasa administrasi keuangan	195.000	154.000	78.191	2.605.978	868.517	192.908	152.037	74.710	2.051.000	830.360	98,93%	98,73%	95,55%	78,70%	95,61%	780.337	779.919
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000	22.000	81.809	96.445	100.000	19.955	21.980	81.752	83.923	99.198	99,77%	99,91%	99,93%	87,02%	99,20%	64.051	64.042
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	50.000	60.000	40.000	64.363	64.363	49.691	42.578	37.622	52.383	61.373	99,38%	70,96%	94,06%	81,39%	95,35%	55.745	55.683
Penyediaan alat tulis kantor	40.000	49.000	50.000	100.000	53.297	39.928	44.384	48.489	63.711	49.342	99,82%	90,58%	96,98%	63,71%	92,58%	58.459	58.445
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000	43.400	58.704	246.900	59.074	47.041	39.802	40.064	123.587	39.505	94,08%	91,71%	68,25%	50,06%	66,87%	91.616	91.024
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	15.000	16.500	25.000	29.706	29.706	14.943	16.408	24.091	14.799	26.329	99,62%	99,44%	96,36%	49,82%	88,63%	23.182	23.171
Penyediaan bahan bacaan dan undangan	15.000	16.500	19.094	22.279	22.200	14.986	16.488	16.363	13.888	14.525	99,91%	99,93%	85,70%	62,34%	65,43%	19.015	19.012
Penyediaan makanan dan minuman	40.000	44.000	48.726	494.328	85.000	38.384	43.710	23.847	326.494	84.932	95,96%	99,34%	48,94%	66,05%	99,92%	142.411	142.088
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000	82.500	83.300	1.282.512	93.488	67.761	75.746	81.297	938.355	92.586	90,35%	91,81%	97,60%	73,17%	99,03%	323.360	321.912
Penunjang administrasi perkantoran	635.520	295.327	199.480	214.308	258.360	502.020	238.417	198.917	207.715	202.320	78,99%	80,73%	99,72%	96,92%	78,31%	320.599	293.899
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam	25.000	27.500	30.788	526.850	27.514	23.335	24.630	30.715	228.165	27.370	93,34%	89,56%	99,76%	43,31%	99,48%	127.530	127.197

daerah																	
Pembangunan gedung kantor	15.598.500	7.212.374	-	-	-	14.904.421	6.197.278	-	-	-	95,55%	85,93%				4.562.175	4.423.359
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	-	-	100.000	445.590	-	-	-	99.750	254.962	-			99,75%	57,22%		109.118	109.118
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000	110.000	200.000	272.305	114.120	99.972	91.534	199.515	266.588	111.820	99,97%	83,21%	99,76%	97,90%	97,98%	159.285	159.279
Pengadaan tanah	27.684.847	11.537.316	11.800.000	37.132.041	12.412.830	26.495.029	7.891.941	2.525.284	27.932.400	6.064.011	95,70%	68,40%	21,40%	75,22%	48,85%	20.113.407	19.875.443
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.750.000	1.384.505	-	-	-	2.613.891	1.295.190	-	-	-	95,05%	93,55%				826.901	799.679
Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	20.000	22.000	30.000	44.360	44.360	19.985	22.000	29.700	44.300	44.100	99,93%	100,00%	99,00%	99,86%	99,41%	32.144	32.141
Pengadaan pakaian kerja lapangan	60.000	6.000	-	-	-	58.949	4.800	-	-	-	98,25%	80,00%				13.200	12.990
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	20.000	32.000	-	-	-	12.651	20.017	-	-	-	63,26%	62,55%				10.400	8.930
Peningkatan jalan (DAK)	15.013.297	-	-	-	-	14.279.037	-	-	-	-	95,11%					3.002.659	2.855.807
Peningkatan Jalan (Banprov)	-	22.000.304	9.137.200	2.044.825	-	-	12.353.046	8.104.883	1.870.388	-		56,15%	88,70%	91,47%		6.636.466	6.636.466
Peningkatan jalan	65.353.000	94.783.436	81.246.746	46.744.316	46.028.880	58.269.987	68.297.428	67.812.411	40.704.920	43.622.281	89,16%	72,06%	83,46%	87,08%	94,77%	66.831.276	65.414.673
Peningkatan jembatan	-	1.000.000	-	5.926.404	863.185	-	928.151	-	4.589.077	845.238		92,82%		77,43%	97,92%	1.557.918	1.557.918
Perencanaan pembangunan jalan	4.020.000	1.500.000	1.500.000	591.453	327.000	3.618.961	1.256.916	1.372.397	313.112	323.951	90,02%	83,79%	91,49%	52,94%	99,07%	1.587.691	1.507.483
Perencanaan pembangunan jembatan	250.000	490.500	250.000	221.869	227.876	-	-	3.770.181	2.421.734	1.499.134	0,00%	0,00%	1508,07%	1091,52%	657,87%	288.049	249.163
Perencanaan turap/ talud/ bronjong	-	-	-	102.788	862	55.569	456.017	238.285	219.120	225.382				213,18%	26146,40%	20.730	20.730
Pembangunan jalan	-	-	5.000.000	3.075.390	1.600.000	-	5.206.518	7.609.841	4.311.736	4.122.983	#DIV/0!		152,20%	140,20%	257,69%	1.935.078	1.935.078
Pembangunan jembatan	-	6.990.890	10.000.000	5.432.552	4.500.000	64.266	26.881	79.099	45.752	87.539		0,38%	0,79%	0,84%	1,95%	5.384.688	5.384.688
Monitoring evaluasi dan pelaporan	100.000	65.135	100.000	69.710	123.089	12.364.609	-	-	-	-	12364,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91.587	84.440
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	14.280.000	-	-	-	-	2.409.753	-	-	-	-	16,88%					2.856.000	2.472.922
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	2.461.371	-	-	-	-	66.111	-	-	-	-	2,69%					492.274	481.951
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	85.000	-	-	-	-	2.176.911	4.079.801	2.261.640	2.936.303	3.934.326	2561,07%					17.000	13.222
Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	2.250.000	4.535.000	2.844.790	3.327.305	4.028.260	1.477.199	-	1.987.122	1.766.394	1.090.687	65,65%	0,00%	69,85%	53,09%	27,08%	3.397.071	3.382.453

Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong gorong	1.500.000	-	2.350.625	1.863.284	1.200.000	-	-	-	102.164	862	0,00%		0,00%	5,48%	0,07%	1.382.782	1.378.222
Pembangunan turap/ talud/ bronjong	-	-	500.000	841.075	1.335.000	-	-	487.207	809.294	1.311.824			97,44%	96,22%	98,26%	535.215	535.215
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	1.430.000	796.760	650.000	727.412	716.117	1.157.264	729.310	600.196	724.425	710.304	80,93%	91,53%	92,34%	99,59%	99,19%	864.058	809.511
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	-	-	300.000	542.008	305.230	-	-	286.611	535.515	301.302			95,54%	98,80%	98,71%	229.448	229.448
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	46.140.000	54.036.039	30.305.250	28.674.407	33.314.626	21.977.945	48.580.781	25.010.090	25.649.074	31.855.256	47,63%	89,90%	82,53%	89,45%	95,62%	38.494.064	33.661.653
Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	-	-	7.250.000	4.848.274	2.738.727	-	-	5.989.637	3.819.022	2.674.202			82,62%	78,77%	97,64%	2.967.400	2.967.400
Pengadaan aspal / PC untuk bantuan ke tingkat desa/ kelurahan	4.500.000	3.091.420	6.650.000	3.715.882	3.000.000	2.541.969	34.311	5.550.271	3.118.243	2.942.019	56,49%	1,11%	83,46%	83,92%	98,07%	4.191.460	3.799.854
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (DAK)	194.817.921	59.464.693	19.469.678	21.014.839	16.185.288	190.239.019	49.774.071	17.880.180	20.994.422	15.241.016	97,65%	83,70%	91,84%	99,90%	94,17%	62.190.484	61.274.703
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	-	-	50.000	-	-	-	-	40.260	-	-			80,52%			10.000	10.000
Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong	-	215.610	250.000	-	-	-	202.668	233.548	-	-		94,00%	93,42%			93.122	93.122
Inspeksi kondisi jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Inspeksi kondisi jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	16.750.000	-	-	-	-	16.663.540	-	-	-	-	99,48%					3.350.000	3.332.708
Penyusunan sistem informasi data base jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Penyusunan sistem informasi data base jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Pengadaan alat alat berat	12.700.000	6.894.320	-	-	-	11.750.141	6.580.893	-	-	-	92,52%	95,45%				3.918.864	3.728.892
Rehabilitasi/	385.000	396.170	400.000	668.245	149.535	371.429	190.126	383.949	588.408	149.149	96,48%	47,99%	95,99%	88,05%	99,74%	399.790	397.076

pemeliharaan alat alat berat																	
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	-	1.042.245	600.000	910.984	637.216	-	807.556	591.983	901.157	626.489		77,48%	98,66%	98,92%	98,32%	638.089	638.089
Perencanaan pembangunan pintu air	-	-	-	-	106.320	-	-	-	-	103.706					97,54%	21.264	21.264
Perencanaan normaslisasi saluran sungai	-	496.415	440.000	174.512	272.760	-	395.595	385.951	172.720	269.178		79,69%	87,72%	98,97%	98,69%	276.737	276.737
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	-	-	-	-	9.248.887	-	-	-	-	8.596.075					92,94%	1.849.777	1.849.777
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	-	-	-	-	454.441	-	-	-	-	267.500					58,86%	90.888	90.888
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	75.000	51.570	40.000	34.721	55.030	12.483	31.195	22.966	27.528	46.651	16,64%	60,49%	57,42%	79,28%	84,77%	51.264	38.761
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	2.638.660	2.650.000	4.014.130	3.219.725	-	2.442.317	2.506.606	3.581.011	3.138.637		92,56%	94,59%	89,21%	97,48%	2.504.503	2.504.503
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	-	1.997.400	2.878.000	1.217.870	1.739.785	-	1.798.023	2.587.846	1.147.753	1.691.231		90,02%	89,92%	94,24%	97,21%	1.566.611	1.566.611
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	-	5.140.280	5.641.148	3.409.482	2.510.329	-	3.071.656	4.492.285	3.395.124	2.309.305		59,76%	79,63%	99,58%	91,99%	3.340.248	3.340.248
Penyusunan program pengembangan RTH	1.120.000	-	-	-	-	526.449	-	-	-	-	47,00%					224.000	105.290
Penataan RTH	5.855.000	-	-	-	-	3.793.705	-	-	-	-	64,79%					1.171.000	758.741
Pemeliharaan RTH	3.500.000	-	-	-	-	2.747.531	-	-	-	-	78,50%					700.000	549.506
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	-	-	-	289.138	311.000	-	-	-	286.633	308.745				99,13%	99,27%	120.028	120.028
Pemetaan Air Bawah Tanah	-	-	245.000	-	-	-	-	220.052	-	-			89,82%			49.000	49.000
Pembangunan rumah sakit	42.500.000	-	-	-	-	42.141.521	-	-	-	-	99,16%					8.500.000	8.428.304
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	-	10.987.465	9.095.000	4.037.766	2.695.000	-	6.726.833	5.043.569	2.847.881	2.583.366		61,22%	55,45%	70,53%	95,86%	5.363.046	5.363.046
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	-	-	4.730.580	674.674	1.107.743	-	-	4.100.751	667.600	1.100.283			86,69%	98,95%	99,33%	1.302.599	1.302.599
Perencanaan bangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	-	-	-	183.682	327.504	-	-	-	181.181	323.495				98,64%	98,78%	102.237	102.237
Penyediaan prasarana sarana air	-	-	7.166.432	5.394.898	3.006.975	-	-	6.116.525	4.799.290	2.985.275			85,35%	88,96%	99,28%	3.113.661	3.113.661

minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah																	
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	73.450	3.120.640	252.829	-	-	52.577	2.867.966	159.758	-	-	71,58%	91,90%	63,19%			689.384	685.209
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	4.915.000	-	-	-	-	162.599	-	-	-	-	3,31%					983.000	32.520
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	-	5.629.360	-	-	-	-	5.281.637	-	-	-		93,82%				1.125.872	1.125.872
Rehabilitasi dan Pemeliharaan bantaran Dan tanggul sungai	-	6.500.000	-	2.762.760	2.398.559	-	4.625.042	-	2.301.692	2.236.960		71,15%		83,31%	93,26%	2.332.264	2.332.264
Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	-	482.236	-	611.943	592.750	-	473.629	-	606.299	586.420		98,22%		99,08%	98,93%	337.386	337.386
Normalisasi/ Pembanguan Jaringan Drainase	-	2.994.260	1.480.990	1.386.280	1.403.843	-	2.443.043	1.397.319	623.403	1.353.168		81,59%	94,35%	44,97%	96,39%	1.453.075	1.453.075
Operasi dan Pemeliharaan Muara dan Pantai	-	1.500.000	-	1.513.025	1.419.056	-	1.245.751	-	1.253.007	1.353.787		83,05%		82,81%	95,40%	886.416	886.416
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pantai dan Muara sungai	-	1.150.000	1.489.000	-	-	-	829.205	1.307.385	-	-		72,10%	87,80%			527.800	527.800
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Banprop)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Perencanaan pengembangan infrastruktur	1.500.000	1.608.000	-	-	-	1.382.870	1.419.641	-	-	-	92,19%	88,29%				621.600	598.174
Pembangun an jalan dan jembatan perdesaan	1.060.000	-	-	-	-	984.452	-	-	-	-	92,87%					212.000	196.890
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	8.250.806	3.687.755	8.506.000	4.040.612	5.027.689	8.094.373	3.087.824	6.944.386	3.977.701	4.653.024	98,10%	83,73%	81,64%	98,44%	92,55%	5.902.572	5.871.286
Rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	2.977.500	1.000.000	2.410.910	1.244.265	826.500	2.912.611	973.171	2.179.110	1.215.148	822.147	97,82%	97,32%	90,39%	97,66%	99,47%	1.691.835	1.678.857
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Kuota Kecamatan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Pembangunan Sarana dan	-	2.063.007	-	-	-	-	1.928.187	-	-	-		93,46%				412.601	412.601

Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)																	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Kuota Kecamatan)	-	238.490	-	-	-	-	221.064	-	-	-		92,69%				47.698	47.698
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)	1.705.291	-	-	-	-	1.649.243	-	-	-	-	96,71%					341.058	329.849
Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	-	-	11.300.000	8.303.000	6.823.149	-	-	9.098.566	6.707.298	6.807.008			80,52%	80,78%	99,76%	5.285.230	5.285.230
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemerintah	-	-	1.200.000	1.916.529	1.958.135	-	-	1.071.444	1.715.678	628.246			89,29%	89,52%	32,08%	1.014.933	1.014.933
Perencanaan Sarana/Prasarana Permukiman	-	-	350.000	253.442	435.819	-	-	303.531	228.759	406.503			86,72%	90,26%	93,27%	207.852	207.852
Perencanaan Gedung	-	-	750.000	233.687	198.704	-	-	443.335	224.282	189.446			59,11%	95,98%	95,34%	236.478	236.478
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	-	200.000	-	178.028	28.096	-	-	-	18.029	25.452		0,00%		10,13%	90,59%	81.225	81.225
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	-	-	-	60.408	61.179	-	-	-	4.870	29.314				8,06%	47,91%	24.317	24.317
Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100.000	110.000	100.000	204.609	182.975	68.474	41.779	39.283	130.474	152.836	68,47%	37,98%	39,28%	63,77%	83,53%	139.517	133.212
Lampu penerangan jalan umum kabupaten kebumen	7.500.000	8.125.000	-	-	-	5.703.196	6.269.422	-	-	-	76,04%	77,16%				3.125.000	2.765.639
Pengembangan/Perluasan Jaringan Listrik Perdesaan (Banprop)	5.774.100	2.579.060	-	-	-	5.529.404	2.068.886	-	-	-	95,76%	80,22%				1.670.632	1.621.693
Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha	30.000	43.000	40.000	44.559	34.856	11.643	28.363	33.170	12.470	22.489	38,81%	65,96%	82,93%	27,98%	64,52%	38.483	34.812
Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	-	50.000	132.692	71.043	-	-	48.017	80.118	48.435			96,03%	60,38%	68,18%	50.747	50.747
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen	105.000	142.500	100.000	174.895	152.107	66.758	63.805	98.107	148.869	135.516	63,58%	44,78%	98,11%	85,12%	89,09%	134.900	127.252

perencanaan																	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	432.000	415.580	145.000	319.845	287.073	295.005	200.863	92.211	134.330	249.351	68,29%	48,33%	63,59%	42,00%	86,86%	319.900	292.501
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	-	110.000	50.000	148.530	126.114	-	99.734	48.721	127.255	124.599		90,67%	97,44%	85,68%	98,80%	86.929	86.929
Pengamanan aset/ barang milik daerah	-	-	150.000	253.550	75.945	-	-	149.578	166.390	65.297			99,72%	65,62%	85,98%	95.899	95.899

Tabel 2.30
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Sampai Dengan Bulan Agustus Tahun 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi)*000	Persentase antara Realisasi dan Anggaran	Rerata Pertumbuhan	
	Agustus 2021	Agustus 2021	Agustus 2021	Anggaran	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.175.461.000	43.663.967.621	31,37%	23.462.329.030,67	234.244.827.614,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	76.106.580	30,44%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	57.342.545	38,23%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.723.711.000	11.878.285.654	60,22%		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.233.010.000	666.666.000	54,07%		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	386.674.000	178.543.887	46,17%		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	66.254.846	44,17%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	19.185.015	38,37%		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	49.415.500	58,14%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.074.000	14.588.700	24,70%		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.200.000	14.792.000	66,63%		
Penyediaan Bahan/Material	94.220.000	59.977.500	63,66%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.614.000	44.411.801	14,39%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	96.000.000	96,00%		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.120.000	113.960.000	32,09%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.620.000	1.232.000	47,02%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.582.000	109.098.189	53,33%		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000	94.970.200	63,31%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	600.000.000	243.110.307	40,52%		
Pemeliharaan Mebel	44.360.000	-	0,00%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.363.000	35.311.620	54,86%		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	0,00%		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.600.000.000	204.106.000	12,76%		
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	3.000.000.000	885.856.760	29,53%		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	967.500.000	305.495.150	31,58%		
Pembangunan Jalan	2.476.929.000	680.353.500	27,47%		
Pelebaran Jalan Menuju Standar	21.664.707.000	6.170.286.300	28,48%		
Pemeliharaan Berkala Jalan	18.822.726.000	7.495.002.337	39,82%		
Pemeliharaan Rutin Jalan	7.463.215.000	4.692.891.608	62,88%		
Pembangunan Jembatan	10.000.000.000	1.737.559.600	17,38%		

Pelebaran Jembatan	1.150.000.000	293.345.500	25,51%		
Pemeliharaan Berkala Jembatan	5.445.000.000	1.117.519.100	20,52%		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	680.000.000	119.530.646	17,58%		
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.495.510.000	1.462.484.250	17,21%		
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.153.175.000	216.057.000	6,85%		
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1.175.000.000	8.615.100	0,73%		
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	130.000.000	94.304.300	72,54%		
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	731.897.000	224.257.750	30,64%		
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	28.000.000	348.000	1,24%		
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	16.689.750	55,63%		
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	20.685.100	41,37%		
Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	23.000.000	5.536.300	24,07%		
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	528.930.000	474.908.500	89,79%		
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	300.000.000	3.687.300	1,23%		
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	45.000.000	8.317.200	18,48%		

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RT RW Kabupaten/Kota	150.000.000	16.896.755	11,26%		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	350.265.000	18.077.650	5,16%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	50.000.000	4.877.749	9,76%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	50.000.000	5.550.500	11,10%		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	50.000.000	6.811.000	13,62%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	50.000.000	26.749.650	53,50%		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100.000.000	2.824.000	2,82%		
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.164.202.000	742.146.331	23,45%		
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	700.000.000	76.226.200	10,89%		
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	167.000.000	15.008.374	8,99%		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	900.000.000	2.287.000	0,25%		
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	2.911.087.000	-	0,00%		
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.114.351.000	894.277.102	14,63%		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.650.055.000	419.199.750	9,01%		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	753.000.000	3.046.500	0,40%		
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	300.000.000	51.099.850	17,03%		

Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.470.698.000	990.260.618	40,08%		
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	880.666.000	10.483.431	1,19%		
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	3.170.000.000	321.055.766	10,13%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan dan laboratorium.
2. Penataan tata ruang wilayah, mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase secara optimal serta berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemanfaatan lahan, pengaturan tata bangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara optimal.
4. Pengembangan manajemen dan meningkatkan SDM yang kompeten serta pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif, dan akuntabel

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Sejalan dengan Program Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan berusaha meningkatkan kondisi Jalan Kabupaten guna mencapai kondisi jalan mantap. Pembukaan jalan baru lingkaran utara Kebumen menjadi prioritas pembangunan jalan dan membuka akses masyarakat ke pusat pelayanan. Penanganan jalan dan jembatan dari tahun ke tahun selalu meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas beserta penganggarnya.

Sebagai daerah yang Sebagian berupa dataran tinggi (pegunungan), Sebagian wilayah Kabupaten Kebumen mengalami krisis air bersih (kekeringan) terutama di musim kemarau. Upaya untuk mengatasi dampak kekeringan sudah dilakukan melalui program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program PAMSIMAS/SPAM Berbasis Masyarakat dan program DAK Air Bersih.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen (RTRW) mempengaruhi beberapa kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama dalam hal pengembangan sarana dan prasarana wilayah serta infrastruktur lainnya. Selain perbandingan hasil yang dicapai antara Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sumber Daya Air dan dan Tata Ruang Jawa Tengah dan Kementrian Pekerjaan Umum, hasil telaah tata ruang menjadi bagian dari analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

Dari berbagai analisis kajian di atas, maka dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

4 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam memberikan Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bentang geografis wilayah Kabupaten Kebumen yang luas menjadi tantangan pemerataan pembangunan di sektor pekerjaan umum.
- b. Peraturan/ kebijakan pemerintah pusat yang belum banyak dipedomani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
- c. Percepatan infrastruktur daerah seiring dengan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah yang melewati wilayah Kabupaten Kebumen.
- d. Kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang sebagian berupa dataran tinggi (pegunungan) berpotensi tinggi terjadi krisis air bersih (kekeringan).
- e. Perkembangan dan perluasan kota seiring dengan pertambahan laju pertumbuhan penduduk, maka bertambah pula produksi sampah yang berpotensi menjadi persoalan yang mendesak untuk diatasi.
- f. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan.
- g. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi.

- h. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multitafsir.
- i. Terbukanya pasar tenaga kerja global yang dapat mempengaruhi tenaga terampil dan tenaga ahli konstruksi dalam negeri.
- j. Adanya tuntutan dan kecenderungan pengelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif.

5 Peluang

Beberapa peluang yang dimiliki dan kemungkinan bisa dioptimalkan dan dikembangkan dalam Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Banyaknya potensi wilayah yang dapat dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas infrastruktur yang dapat mendukung sektor ekonomi, sosial dan budaya menuju kesejahteraan masyarakat.
- b. Banyaknya proyek pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja local dan mengurangi angka pengangguran.
- c. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) dan Undang-Undang Cipta Kerja yang diterapkan sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai wujud dari partisipasi publik.
- d. Program-program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementrian Pekerjaan Umum yang bisa diakses untuk membantu menunjang pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- e. Adanya dukungan dari Lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
- f. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- g. Kondisi stabilitas keamanan, ketertiban dan politik yang kondusif di Kabupaten Kebumen, sehingga memperbesar kemungkinan Kerjasama dengan berbagai Lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Lain, Swasta, LSM, dan Lembaga-lembaga lainnya.

- h. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
 - i. Terbukanya pasar tenaga kerja jasa konstruksi ke Luar Negeri.
- 6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan
- a. Pelaksanaan kegiatan yang kurang mempedomani dokumen perencanaan secara menyeluruh dalam penyusunan rencana kerja sehingga target kinerja yang ditetapkan pada awal periode yang lalu tidak seluruhnya terakomodasi pada dokumen pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.
 - b. Keterbatasan personil pada seluruh bidang yang secara teknis menangani kegiatan.
 - c. Faktor geografi, wilayah Kebumen terbagi dalam wilayah pegunungan yang dilewati sungai besar, yang mempersulit mobilisasi masyarakat.

Meski demikian, beberapa indikator menunjukkan kemajuan yang berarti. Penampilan fisik gedung-gedung perkantoran pemerintah sudah semakin baik. Prosentase kondisi jalan baik menunjukkan kenaikan cukup signifikan baik Jalan Kabupaten maupun Jalan Desa dengan penambahan jumlah ruas maupun panjang Jalan Kabupaten.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

3.1.1 Sekretariat

1. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal. Aset infrastruktur memerlukan penanganan khusus yang terintegrasi antar bidang.
2. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum optimal.
3. Belum optimalnya profil data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.2 Bina Marga

1. Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
2. Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
3. Dalam rangka tindak lanjut amanat regulasi dalam pengelolaan jalan dan jembatan perlu disusun Rencana induk pengembangan jalan kabupaten dan Rencana induk pengembangan jembatan kabupaten serta penyusunan masterplan penataan koridor jalan Kabupaten Kebumen.

3.1.3 Cipta Karya

1. Dalam rangka tindak lanjut amanat regulasi dalam pengelolaan Gedung sesuai Undang-undang dan regulasi turunan tentang keciptakarya, bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung sehingga disusun rencana aksi dan review regulasi keciptakarya dan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung.
2. Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi sesuai amanat Undang-undang Jasa Konstruksi dan kebutuhan masyarakat konstruksi dan perlunya review regulasi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan optimalisasi pembinaan jasa konstruksi
3. Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan.
4. Dalam rangka tindak lanjut amanat regulasi dalam pengelolaan Air Bersih sesuai Undang-undang dan regulasi turunan tentang Air Bersih perlu review rencana aksi sektoral berupa rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM).
5. Penampilan fisik gedung perkantoran memang sudah terlihat bagus dan megah, namun masih terdapat beberapa gedung perkantoran dan bangunan pendukung lainnya yang belum mengakomodir fasilitas ramah disabilitas dan ramah anak, masih nampak kusam dan kurang terawat, hal ini disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua.
6. Masih rendahnya tingkat pencapaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau yang sebelumnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan kurangnya sosialisasi mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.

3.1.4 Sumber Daya Air

1. Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air.
3. Adanya perilaku buruk masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan daerah tangkapan air di hulu maupun hilir (baik di badan sungai, drainase, irigasi dan bangunan air lainnya).
4. Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau.
5. Kurangnya daya tampung penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dalam rangka konservasi sumber daya air.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemanfaatan sumber daya air seperti perizinan pemakaian tanah pengairan dan pemakaian air permukaan.
7. Dalam rangka tindak lanjut amanat regulasi dalam pengelolaan irigasi dengan melakukan review terhadap Peraturan Daerah tentang Irigasi dan penyusunan rencana aksi sektoral berupa rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi (RP2I) dan Studi potensi air baku kabupaten.

3.1.5 Tata Ruang

1. Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja berikut regulasi turunannya memerlukan penyesuaian regulasi pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 berikut penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan Informasi Tata Ruang
2. Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
3. Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagai amanat UU Cipta Kerja dan digunakan sebagai regulasi rekomendasi investasi di Kabupaten Kebumen.

3.1.6 Pertanahan

1. Masih ditemukannya permasalahan sengketa tanah dalam penelusuran dan pemanfaatan tanah asset pemerintah daerah.
2. Belum optimalnya fasilitasi, pengelolaan, dan pengendalian sengketa pertanahan asset tanah pemerintah daerah.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih , serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN
SEJAHTERA, MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang

oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

b. Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

c. Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata,

namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Akronim dari Visi Bupati Kebumen adalah :

KEBUMEN SEMARAK

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Barakhlak Bersama Rakyat”

2. Misi

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Dalam perumusan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam RPJMD. Misi ini sejalan dengan Misi IV Bupati Kebumen dan sesuai fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, yaitu :

Misi I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), diperlukan dalam upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan sistem, yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua pada tingkatan institusional, perlu dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas

pokok dan fungsi. Yang Ketiga pada tingkatan individu, akan dikembangkan dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (ketrampilan/skill, pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude) dan motivasi serta kreativitas personil yang berkerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Pelayanan responsif kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan akhir dari Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menekankan pada perbaikan tingkatan sistem, tingkatan institusional dan tingkatan individu dilakukan secara terintegrasi, sehingga pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pelayanan berbasis e-gov dan open-gov senantiasa akan ditingkatkan dengan memaksimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan.

Misi IV : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana social dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen tersebut maka peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah bagaimana melaksanakan pembangunan daerah yang senantiasa dilandasi keinginan untuk terus maju dan mandiri, terutama di bidang pekerjaan umum.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya.

3. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 didukung beberapa program unggulan. Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang selaras dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah Program Unggulan pada Misi ke-4, yaitu :

a. Program JAMU SEGER (JAlan MUluS Ekonomi BerGERak)

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat.

b. Program BANYU MILI (Air Irigasi tersedia terus)

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi irigasi sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat.

c. Program BALANE AKU (Pengembangan Layanan Air Minum Dan Pembangunan Pengelolaan Air Baku)

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Embung sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat.

d. Program Air Minum Pedesaan berbasis masyarakat

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum sebagai upaya mendukung dan meningkatkan akses perekonomian dan pelayanan dasar masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Visi

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

“KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF, DAN PROFESIONAL” DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020-2024, di mana infrastruktur yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

b. Misi

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Rencana Strategis periode 2020-2024 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandate yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Misi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

c. Tujuan

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan merupakan kondisi yang hendak dituju pada akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yang hendak dicapai secara nyata dalam 5 tahun yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Tugas Teknis Lainnya. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan.

Agar kebutuhan pihak yang dilayani dapat terpenuhi, diperlukan upaya dalam proses internal (internal process) yang harus dilakukan dengan baik untuk mencapai sasaran program, yaitu meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur yang hendak dicapai melalui beberapa indikator sebagai tersebut:

- 1) Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki.
- 2) Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur.

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya pengelolaan

sumberdaya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten dan berkepribadian;
- 2) Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif efisien, transparan dan akuntabel; dan
- 3) Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

2. Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Penataan Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kementrian Agraria dan Penataan Ruang / Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui fungsi Kementrian Agraria dan Penataan Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut :

Fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; (2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; (5) pelaksanaan

bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan (6) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Badan Pertanahan Nasional mempunyai fungsi: (1) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; (2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan; (3) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; (4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan; (5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; (6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; (7) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; (8) pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; (9) pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan; (10) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan (11) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Beberapa isu yang memang menjadi *concern* bersama misalnya integrasi hak atas tanah dan pemanfaatan ruang, kebutuhan akan *one map policy* (peta yang terintegrasi), dan penggabungan urusan penataan ruang di Kementerian Pekerjaan Umum ke dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun demikian, dua hal lain yang juga perlu mendapatkan pertimbangan pertama upaya untuk meningkatkan efektifitas kerja kementerian ini dan kedua upaya mengatasi problematika penataan ruang yang selama ini menghambat banyak Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana tata ruangnya.

3. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ketiga yaitu sebagai berikut :

“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran“

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

1) Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, (Tetep) mboten korupsi mboten ngapusi ”

2) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih

- a) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran pemerintahan kabupaten/kota;
 - c) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
 - d) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
- 3) Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melaksanakan pengelolaan jalan provinsi untuk menjaga pelayanan jalan dalam rangka kelancaran arus penumpang dan arus barang dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi, sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dituangkan pada tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- b) pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;
- d) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang yang ke 1 (satu) yaitu perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang, fungsi yang ke-2 (dua) yaitu pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang dan fungsi ke-3 (tiga) yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis, Irigasi dan Air

Baku, Sungai, Bendungan dan Pantai serta Penataan Ruang;

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018- 2023 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan lestari, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang irigasi dan air baku, bidang bendungan dan pantai kepada masyarakat dan bidang tata ruang.

4. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ketiga yaitu sebagai berikut :

“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran“

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengefektifkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2018-2023, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

- 3) Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih
“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, (Tetep) mboten korupsi mboten ngapusi ”
- 4) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Terpilih
 - e) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran pemerintahan kabupaten/kota;
 - g) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
 - h) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
- 5) Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dengan Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melaksanakan pengelolaan jalan provinsi untuk menjaga pelayanan jalan dalam rangka kelancaran arus penumpang dan arus barang dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi, sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Misi Kepala Daerah yang ke 3 (Tiga) sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dituangkan pada tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung;
- b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
- c) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- d) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

Misi kepala daerah yang ke 3 (Tiga) yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sangat terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya yang ke 1 (Satu) yaitu Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung serta fungsi yang ke 2 (Dua) yaitu Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksanaan jalan serta sarana prasarana pemukiman dan bangunan gedung.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu melaksanakan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai

ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018- 2023 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Jawa Tengah yang Sejahtera dan lestari, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke binamargaan kepada masyarakat dan bidang sarana dan prasarana permukiman dan bangunan gedung.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

1. Tantangan Pembangunan Bidang Penataan Ruang
 - a. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, pengembangan kawasan.
 - c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku,
 - d. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan runag
 - e. Meingkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

- a. Optimalisasi dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi dan komunikasi penunjang pembangunan daerah.
- b. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air.
- c. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana cipta karya.
- d. Peningkatan pelayanan air minum dan pengelolaan SDA.
- e. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
- f. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- g. Menyelaraskan pola penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- h. Meningkatkan alih fungsi lahan pertanian dan nonpertanian.

3.5. Isu-isu Strategis

Kabupaten Kebumen secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa tengah dan secara geografis terletak di bagian selatan yang berbatasan dengan

Sebelah selatan Samudera Hindia

Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo

Sebelah timur Kabupaten Purworejo

Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas

Sebagai kabupaten yang terletak di jalur selatan Jawa, Kabupaten Kebumen berada di antara daerah yang pertumbuhan ekonominya

cukup tinggi, yaitu Kabupaten Banyumas dan Cilacap sebelah barat dan Provinsi Yogyakarta sebelah timur. Potensi ini mendorong Kabupaten Kebumen untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai yang mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian.

Kekuatan dan keunggulan daerah yang dimiliki Kabupaten Kebumen perlu terus digali dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Alam (SDA), hasil bumi/pertanian dan pariwisata memberi kontribusi besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terus dipacu, diberdayakan dan ditingkatkan dari tahun ke tahun. Potensi keindahan alam diharapkan mampu memberikan warna pada dunia pariwisata sebagai destinasi pilihan, berdampingan dengan agrowisata berupa hasil bumi dan pertanian.

Perhatian besar untuk terus meningkatkan daya saing daerah mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholder atau pemangku kepentingan. Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen telah dilakukan melalui alokasi anggaran yang mendukung kegiatan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur mendapat perhatian serius mengingat masih banyaknya kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Namun demikian, ketersediaan anggaran untuk pembiayaan proyek infrastruktur masih terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan.

Gambaran jelas kondisi infrastruktur yang menjadi bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, hal ini dapat dilihat dari Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2020, total panjang Jalan Kabupaten adalah 960,358 Km, sepanjang 365,191 Km (38,027 %) dengan kondisi baik, sepanjang 337,400 Km (35,133 %) dengan kondisi sedang, sepanjang 124,364 Km (12,950 %) dengan kondisi rusak ringan, dan sepanjang 133,403 Km (13,891 %) dengan kondisi rusak berat.

- b. Meningkatnya kerusakan jalan akibat kondisi struktur tanah yang labil, bencana alam dan tingkat penggunaan jalan yang Over Load Over Dimension (ODOL).
- c. Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Karanggayam, Sruweng, Karangsambung, Sadang, Padureso, Alian dan Poncowarno.
- f. Masih ditemukan genangan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.
- g. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan.
- h. Masih kurang penanganan kerusakan sungai, muara, dan pantai akibat banjir dan abrasi gelombang air laut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah merupakan suatu kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran DPUPR Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke I (satu) dan Misi ke IV (empat) RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Misi I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi

Misi IV : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Dalam rangka mendukung tercapainya kedua misi tersebut ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran DPUPR tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Misi I adalah :

a. Tujuan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

b. Sasaran

Tertanganinya kasus sengketa lahan

2. Tujuan dan Sasaran Misi IV adalah :

a. Tujuan

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

b. Sasaran

Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk lebih jelas tujuan dan sasaran DPUPR Kabupaten Kebumen selama periode Rencana Strategis 2021-2026, indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,97	82,50	Indeks	83	84	85	85,5	86
		Tertanganinya kasus sengketa lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100	100	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah		Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	46,53	51,86	indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	56,15	56,55	indek	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Jadi arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di laksanakan dengan penyusunan program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dipilih secara prioritas bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas pembangunan. Program prioritas bertujuan untuk memilih program-program yang harus didahulukan menyesuaikan kemampuan sumber daya keuangan dan daya manusia yang terbatas. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah. Perencanaan

yang baik disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Salah satu poin penting dalam aktivitas tersebut adalah upaya memperbaiki kinerja, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga pembangunan daerah yang merata ke seluruh masyarakat dapat terwujud.

Penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan, memerlukan analisis lingkungan yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri atas kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai, di lain pihak, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Hasil rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masukan dari komponen masyarakat terkait disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI :Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Tertanganinya kasus sengketa lahan	Mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kab.	1. Mensosialisasikan RTRW kepada masyarakat yang akan menggunakan dan memanfaatkan lahan dan tertib administrasi pertanahan 2. Perbaiki sistem dan manajemen

		Kebumen dan tertib administrasi pertanahan	sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur
MISI IV : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan, Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Pengembangan Sistem Pengembangan Airminum serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung Tujuan Pemerintah Daerah	1. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2. pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa: a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan) d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong e. Penyediaan jalan menuju kawasan industry f. Peningkatan jalan menuju lokasi prioritas tujuan pemerintah daerah 3. Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa: a. Optimalisasi Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Pedesaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih pedesaan b. Peninkatan infrastruktur pengelolaan SDA (Drainase,Irigasi dan Embung) yang menjadi kewenangan Kabupaten 4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri

			Primer Wilayah Perkotaan Kebumen a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. *Pertama*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua Perangkat Daerah, tidak langsung berhubungan dengan sasaran namun tetap memberi dukungan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara langsung mencapai sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah pada semua bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). *Kedua*, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan Perangkat Daerah dan kewajiban sebagai Perangkat Daerah penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. *Ketiga*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah atau dalam hal ini Urusan Pilihan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - 6) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 7) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
 - 8) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - 2) Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 4) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 5) Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 6) Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
 - 7) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
 - 2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 - 2) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

- 3) Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Sub Kegiatan Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan
 - 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2) Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
 - 3) Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan
 - 4) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - 5) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 8) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - 9) Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan
 - 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan
 - 12) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan
 - c. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non-Kecil dan Kecil)
 - 1) Sub Kegiatan Dukungan / Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
 - d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

10. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahandalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen dan menjadi outcome dari setiap kegiatan dan sub kegiatan di bawahnya. Indikator kinerja kegiatan mengandung output hasil langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja sub kegiatan mengandung output hasil langsung dari sub kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terangkum dalam Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen.

6.4. Pendanaan

Secara rinci penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dapat dilihat pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 6.1
Rencana Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangun an	Indikator	Satuan Target	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Akhir (2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Indikator Tujuan			Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah		indeks	46,53	51,86	53,81		59,27		63,10		66,89		70,69		70,69		
Indikator Sasaran			Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		indek	56,15	56,55	57,35		59,16		61,48		63,67		65,89		65,89		
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
1	03		Pekerjaan umum dan penataan ruang						174.952.617		174.465.353		192.210.441		171.522.015		171.980.329		885.130.755	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	23.880.216	100,00	25.032.064	100,00	25.782.899	100,00	25.673.408	100,00	26.133.326	100,00	126.501.913	
1	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		19	17	350.666	17	361.185	17	372.021	17	372.021	17	372.021	17	1.827.914	
1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen		5	5	105.432	5	108.595	5	111.853	5	111.853	5	111.853	5	549.586	

1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen		12	12	245.234	12	252.590	12	260.168	12	260.168	12	260.168	12	1.278.328	
1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	12	21.453.768	12	22.019.962	12	22.423.942	12	22.314.451	12	22.774.369	12	110.986.492	
1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN mendapatkan gaji dan tunjangan	Bulan		14	14	20.067.094	14	20.385.688	14	20.709.060	14	21.037.283	14	21.370.431	14	103.569.556	
1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Bulan		11	11	1.000.000	11	1.236.000	11	1.304.660	11	854.639	11	968.734	11	5.364.033	
1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	Paket		1	1	386.674	1	398.274	1	410.222	1	422.529	1	435.204	1	2.052.903	
1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket		2	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	996.820	
1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	Kegiatan		2	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	996.820	
1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan		12	12	629.108	12	644.189	12	659.722	12	659.722	12	659.722	12	3.252.463	

1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan		12	12	50.000	12	51.500	12	53.045	12	53.045	12	53.045	12	260.635	
1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan		12	12	85.000	12	87.550	12	90.176	12	90.176	12	90.176	12	443.078	
1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan		12	12	59.074	12	60.847	12	62.673	12	62.673	12	62.673	12	307.940	
1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bulan		12	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	111.000	
1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Mate rial	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	Bulan		12	12	104.220	12	104.220	12	104.220	12	104.220	12	104.220	12	521.100	
1	2.06	9	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan		12	12	308.614	12	317.872	12	327.408	12	327.408	12	327.408	12	1.608.710	
1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Bulan		129	0	-	138	414.634	152	735.120	149	735.120	145	735.120	145	2.619.994	
1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit		4	0	-	9	187.384	12	504.470	11	504.470	16	504.470	48	1.700.794	

1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit		125	0	-	125	127.250	125	127.250	125	127.250	125	127.250	500	509.000	
1	2.07	7	Pengadaan Mebeler	Jumlah unit pengadaan mebel	Unit		0	0	-	20	100.000	20	103.400	20	103.400	20	103.400	80	410.200	
1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		12	12	367.202	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	1.855.526	
1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12	12	2.620	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	13.412	
1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12	204.582	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	1.022.914	
1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	12	160.000	12	164.800	12	164.800	12	164.800	12	164.800	12	819.200	
1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan		12	12	880.108	12	1.020.649	12	1.020.649	12	1.020.649	12	1.020.649	12	4.962.704	
1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan		12	12	610.000	12	610.000	12	610.000	12	610.000	12	610.000	12	3.050.000	
1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel	Bulan		12	12	54.360	12	54.360	12	54.360	12	54.360	12	54.360	12	271.800	

1	2.09	6	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan		12	12	74.364	12	74.364	12	74.364	12	74.364	12	74.364	12	371.820	
1	2.09	9	Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor DPUPR yang layak fungsi	Paket		1	1	141.384	1	281.925	1	281.925	1	281.925	1	281.925	1	1.269.084	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	24.842.323	80,00	25.000.000	82,50	25.000.000	85,00	25.000.000	87,50	25.000.000	87,50	124.842.323	
2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	%		7	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	4.625.000	
2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Unit		2	2	105.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000	10	525.000	
2	2.01	6	Pembanguna n Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terbangun	Unit		3	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000	
2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaa n Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	Unit		4	1	270.000	1	270.000	1	270.000	1	270.000	1	270.000	14	2.850.000	

2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah monev SDA yang dilaksanakan	Unit		3	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	15	250.000	
2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah areal irigasi yang terlayani	Kegiatan			7	23.917.323	7	24.075.000	7	24.075.000	7	24.075.000	7	24.075.000	7	120.217.323	
2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Ha		18	15	900.000	15	900.000	15	900.000	15	900.000	15	900.000	75	4.500.000	
2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terbangun	Dokumen			1	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	200.000	
2	2.02	7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT yang terbangun	Daerah Irigasi		24	25	1.444.000	25	1.444.000	25	1.444.000	25	1.444.000	25	1.444.000	125	7.220.000	
2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan	Lokasi				-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000	
2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah daerah irigasi yang terehabilitasi	Daerah Irigasi		8	10	12.552.614	10	12.552.614	10	12.552.614	10	12.552.614	10	12.552.614	50	62.763.070	
2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang terpelihara	Daerah Irigasi		17	17	8.430.709	17	8.430.709	17	8.430.709	17	8.430.709	17	8.430.709	85	42.153.545	

			Permukaan																	
2	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah JIAT terpelihara	Lokasi		6	0	-	1	57.677	1	57.677	1	57.677	1	57.677	4	230.708	
2	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah kegiatan rapat komir, rapat p3a dan rapat alokasi air yang diadakan	Kegiatan			30	590.000	30	590.000	30	590.000	30	590.000	30	590.000	150	2.950.000	
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	%	17,54	18,75	20	9.239.754	21,25	9.046.845	22,5	9.048.250	23,75	9.049.697	25	9.051.188	25	45.435.734	
3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani	SR	53.257	57.624	62.193	9.239.754	66.833	9.046.845	71.546	9.048.250	76.332	9.049.697	81.192	9.051.188	81.192	45.435.734	
3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		9	8	294.520	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	24	694.520	
3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah pengawasan SPAM	Dokumen			0	-	1	33.687	1	35.092	1	36.539	1	38.030	1	143.348	
3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terbangun	Lokasi		41	25	6.399.754	15	5.799.754	15	5.799.754	15	5.799.754	15	5.799.754	85	29.598.770	
3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan	Jumlah SPAM yang ditingkatkan	Lokasi		17	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	10	2.500.000	50	12.500.000	

			Perpipaan di Kawasan Perdesaan																	
3	2.01	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang diperbaiki	Lokasi			0	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	800.000	
3	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah pelatihan KP SPAM	Kegiatan			0	-	2	367.924	2	367.924	2	367.924	2	367.924	2	1.471.696	
3	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terpelihara	Lokasi		6	1	45.480	1	45.480	1	45.480	1	45.480	1	45.480	1	227.400	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	15,98	15,98	15,98	7.038.000	17,04	7.000.000	18,01	7.000.000	19,98	4.787.176	20,04	5.212.824	20,04	31.038.000	
6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/dibangun	Lokasi		26	12	7.038.000	14	7.000.000	14	7.000.000	13	4.787.176	16	5.212.824	69	31.038.000	
6	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Lokasi			6	400.000	14	412.000	14	412.000	13	387.176	16	212.824	63	1.824.000	
6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah saluran drainase yang terpelihara	Dokumen		2	8	2.883.000	10	2.415.350	10	2.415.350	10	2.000.000	10	2.000.000	48	11.713.700	

6	2.01	12	Pembanguna n Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terbangun	Lokasi		9	3	600.000	3	618.000	3	618.000	2	400.000	5	1.000.000	16	3.236.000	
6	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang terehabilitasi	Lokasi		15	1	3.155.000	1	3.554.650	1	3.554.650	1	2.000.000	1	2.000.000	5	14.264.300	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	80,13	80,13	81,14	900.000	81,14	1.463.455	82,15	1.272.019	83,16	4.880.874	83,84	4.390.029	83,84	12.906.377	
8	2.01		Penyelenggar aan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	80,13	80,13	81,14	900.000	81,14	1.463.455	82,15	1.272.019	83,16	4.880.874	83,84	4.390.029	83,84	12.906.377	
8	2.01	2	Perencanaan , Pembanguna n, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/ kota yang terbangun	Pemohon		4	4	-	5	400.000	5	300.000		2.300.000	6	2.050.000	20	5.050.000	

8	2.01	1	Penyelenggara an Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Pemohon Penyelenggara an Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	Unit		300	350	150.000	400	154.500	450	159.135	500	163.909	550	168.827	2250	796.371	
8	2.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada semua instansi pemerintah Kabupaten Kebumen Screen reader support enabled.	Unit		7	8	-	9	33.075	10	34.728	11	36.464	12	38.287	50	142.554	
8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi penyelenggara an Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Kebumen	Kegiatan		7	8	50.000	9	51.500	10	53.045	11	54.636	12	56.275	50	265.456	
8	2.01	9	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penilaian terhadap penyelenggara an Bangunan Gedung di Kabupaten Kebumen	Unit		75	87	-	100	24.380	112	25.111	125	25.865	137	26.640	561	101.996	

8	2.01	13	Pemeliharaa n dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/ kota yang terpelihara	Unit		3	2	700.000	4	800.000	4	700.000	4	2.300.000	4	2.050.000	18	6.550.000	
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,04	13,04	13,91	3.061.000	13,91	579.481	15,00	593.455	15,00	608.127	15,00	623.533	15,00	5.465.596	
9	2.01		Penyelenggar aan Penataan Bangunan dan Lingkungann ya di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	0	0	0	3.061.000	5	579.481	5	593.455	6	608.127	6	623.533	22	5.465.596	
9	2.01	5	Pemberdaya an Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bantuan semen ke tingkat desa/ kelurahan	zak	0	6.000	61.220	3.061.000	6.000	300.000	6.000	300.000	6.000	300.000	6.000	300.000	85220	4.261.000	
9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen	0	0	0	-	5	279.481	5	293.455	6	308.127	6	323.533	22	1.204.596	
1	03	10	Program Penyelenggar aan Jalan	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	74,23	104.063.300	76,23	104.908.977	79,48	122.036.029	82,23	100.000.000	85,18	100.000.000	85,18	531.008.306	
1 0	2.01		Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	Km	24	24	24,62	104.063.300	24,84	104.908.977	30,84	122.036.029	24,84	100.000.000	24,84	100.000.000	130,00	531.008.306	

10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Unit	22	22	20	1.500.000	20	1.500.000	20	1.500.000	20	1.500.000	20	1.500.000	100	7.500.000	
10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah tanah yang dibebaskan	Dokumen	4	4	1	5.724.151	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	9.724.151	
10	2.01	4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survei kondisi jalan/jembatan	Lokasi	2	2	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	2.500.000	
10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Kegiatan Monev yang terlaksana	Dokumen	48	48	48	935.000	48	935.000	48	935.000	48	935.000	48	935.000	48	4.675.000	
10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang terbangun	Km	4	4	2,80	11.208.000	2,80	11.208.000	2,80	11.208.000	2,80	11.208.000	2,80	11.208.000	14,01	56.040.000	
10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah panjang jalan menuju standar	Km	8	8	4,46	15.600.000	4,46	15.600.000	4,46	15.600.000	4,46	15.600.000	4,46	15.600.000	22,29	78.000.000	
10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara berkala	Km	7	7	17,37	52.096.149	17,59	52.757.000	23,59	70.757.000	17,59	52.757.000	17,59	52.757.000	93,71	281.124.149	
10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	Km	5	5	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	310	62.000.000	
10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	Unit	1	1	0	-	1	3.908.977	1	3.036.029	0	-	0	-	2	6.945.006	
10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan	Unit	2	2	0	-	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	-	2	2.000.000	

10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala	Unit	9	9	10	3.100.000	10	3.100.000	10	3.100.000	10	3.100.000	10	3.100.000	50	15.500.000	
10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Unit	10	10	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	50	5.000.000	
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	%	44,92	44,92	44,92	387.224	50,15	498.840	55,08	510.805	60,00	523.130	64,92	535.824	64,92	2.455.823	
11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Kegiatan	0	0	2	192.724	2	298.763	2	304.460	2	310.595	2	316.914	10	1.423.456	
11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan	Kegiatan	0	0	1	132.462	1	198.763	1	204.460	1	210.595	1	216.914	5	963.194	
11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah kegiatan yang diadakan	Kegiatan	0	0	1	60.262	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	460.262	
11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota	Kegiatan	60	60	62	147.250	62	151.410	62	156.218	62	160.905	62	165.730	310	781.513	
11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi	Pemohon	60	60	60	47.250	60	48.668	60	50.128	60	51.630	60	53.180	300	250.856	
11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaan Material	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	60	60	2	100.000	2	102.743	2	106.090	2	109.275	2	112.550	10	530.658	

			dan Peralatan																	
1 1	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah penerbitan rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan kecil)	Pemohon	100	100	110	47.250	120	48.667	130	50.127	140	51.630	150	53.180	650	250.854	
1 1	2.03	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah pemohon penerbitan rekomendasi teknis IUJK Nasional	Pemohon	100	100	110	47.250	120	48.667	130	50.127	140	51.630	150	53.180	650	250.854	
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%	75,00	75,00	91,15	1.540.800	91,25	835.691	91,35	866.984	91,45	899.603	91,55	933.605	91,55	5.076.683	
1 2	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		2	2	1.145.480	2	440.271	2	471.564	2	504.183	2	538.185	2	3.099.683	
1 2	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW yang tersusun	Dokumen		1	1	100.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	5	300.000	

1 2	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Dokumen		1	1	1.045.480	1	390.271	1	421.564	1	454.183	1	488.185	5	2.799.683	
1 2	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	Kegiatan		26	28	145.400	27	145.500	27	145.500	27	145.500	27	145.500	27	727.400	
1 2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan	Kegiatan		12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	250.000	
1 2	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan RRTR yang dilaksanakan	Kegiatan		12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	250.000	
1 2	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi yang terlaksana	Kegiatan		2	2	45.400	3	45.500	3	45.500	3	45.500	3	45.500	14	227.400	
1 2	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	Dokumen		100	110	195.400	120	195.400	130	195.400	140	195.400	150	195.400	150	977.000	
1 2	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen KRK yang tersusun	Dokumen		100	110	100.000	120	100.000	130	100.000	140	100.000	150	100.000	650	500.000	

1 2	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang terupdate	%		100	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	477.000	
1 2	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kot a	Kegiatan		0	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	272.600	
1 2	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi TKPRD yang terlaksana	Kegiatan			12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	272.600	
2	10		Pertanahan						-		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000	
	Indikator Tujuan		Indeks Kepuasan Masyarakat				81,97	82,50	83,00		84,00		85,00		85,50		85,50		85,50	
	Indikator Sasaran		Persentase Penanganan Sengketa Lahan				100	100	100		100		100		100		100		100	
2	10.0 4		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100.000	100	100.000	100	100.000	100,00	100.000	100,00	400.000	
2	10.0 4.2.0 1		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	0	0	3	-	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	10	400.000	
2	10.0 4.2.0 1	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	Sengketa	0	0	3	-	3	100.000	3	100.000	3	100.000	3	100.000	10	400.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument penanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kebaerhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematic tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)							
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen.

7.1. Standar Pelayanan Minimal

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Program pembangunan

daerah yang mendukung pelaksanaan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri atas:

- a. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten

Tabel 7.2**Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2020						
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)×100%	TARGET
			PDAM	SPAM PERDESAAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.388.490	122.788	296.006	763.378	1.182.172	85,14%	100%

Tabel 7.3
Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target pencapaian (%)					Nomenklatur Urusan Kabupaten	Alokasi Anggaran (Ribuan Rupiah)					Sumber Pendanaan	OPD
			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.239.754	9.046.845	9.048.250	9.049.697	9.051.188	APBD KABUPATEN KEBUMEN	DPUPR
								Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.239.754	9.046.845	9.048.250	9.049.697	9.051.188		DPUPR
								Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	294.520	100.000	100.000	100.000	100.000		DPUPR
								Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	-	33.687	35.092	36.539	38.030		DPUPR
								Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.399.754	5.799.754	5.799.754	5.799.754	5.799.754		DPUPR
								Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		DPUPR
								Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	200.000	200.000	200.000	200.000		DPUPR
								Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	-	367.924	367.924	367.924	367.924		DPUPR
								Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	45.480	45.480	45.480	45.480	45.480		DPUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan	100	100	100	100	100	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.889.456	6.446.361	6.554.235	7.122.898	6.853.426	APBD KABUPATEN KEBUMEN	DISPERKI MHUB

		pengolahan air limbah domestik						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.889.456	6.446.361	6.554.235	7.122.898	6.853.426		DISPERKIM HUB
								Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.938.776	5.367.613	5.367.613	5.817.613	5.417.613		DISPERKIM HUB
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	950.680	1.078.748	1.186.622	1.305.285	1.435.813		DISPERKIMHUB

Sumber: DPUPR 2021

Tabel 7. 4
Rumus Indikator Kinerja dan SPM DPUPR

No.	Indikator	Rumus Indikator
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	jumlah sengketa lahan yang ditangani / jumlah sengketa lahan yang terjadi x 100%
3.	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	(indeks infrastruktur pekerjaan umum (dalam %) + indeks infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (dalam %) + indeks infrastruktur perhubungan (dalam %)) : 3
4.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	(persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap + persentase jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik + persentase pelayanan air bersih perpipaan) : 3
	SPM DPUPR	
1.	Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah orang yang terlayani dibagi jumlah Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan x 100%

Sumber: DPUPR 2021

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, serta penerjemahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 di bidang pekerjaan umum. Rencana Strategis ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis ini disusun selain mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen, juga melihat hasil reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam hal ini melihat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen juga melihat perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kebumen selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Rencana Strategis disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Kebumen berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen. Rencana Strategis ini segera diimplementasikan dan dicermati agar sesuai akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, Kerjasama, loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, namun juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan seluruh bidang dan Perangkat Daerah terkait dalam Bersama-sama mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kebumen.

8.2. Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2026, dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen periode 2021-2026 berakhir, sedangkan periode akhir Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2026. Oleh karena itu dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2026 tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah pada tahun 2026. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah program transisi, disebut program transisi karena program tersebut menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2026 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Rencana Strategis baru merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen terpilih untuk masa jabatan 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu

pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

8.3. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yang disusun melalui berbagai tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan, Rancangan Akhir Rencana Strategis dan diakhiri dengan Penetapan. Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen dalam rangka penyelarasan akhir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen dan telah diajukan kepada Kepala Daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menetapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam Menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
2. Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
3. Pejabat Eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen bertanggungjawab atas kinerja kegiatan dan sub kegiatan (*output*) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
4. Evaluasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun.
5. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan realisasinya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen setiap tahun.
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen setiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan digunakan juga untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen dan dijadikan sebagai instrument untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam mencapai sasaran.
7. Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memerlukan perbaikan atau revisi Rencana

Strategis, maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renjana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen periode berikutnya atau dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen jika pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Kebumen juga dilakukan revisi karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundangan.

Kebumen,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST., MT.

Pembina Tk. I

NIP. 19740126 199903 1 004